PENGADILAN NEGERI PARIGI KELAS II

LAPORAN PELAKSNAAN KEGIATAN TAHUN 2023



JL Sungai Pakabata Kab.Parigi Moutong Sulawesi Tengah
www.pn-parigi.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Parigi Kelas II Dari Periode Pertama sampai dengan Sekarang



A.S PALUMPUN, SH., MH.
Periode 11 Des. 2008 – 27 Juni 2011



I MADE SUKANADA, SH., MH.
Periode 27 Juni 2011 – 19 Feb. 2014



E L F I A N, SH., MH.
Periode 19 Feb. 2014 – 17 Des. 2015



EFRATA H. TARIGAN, SH., MH.
Periode 17 Des. 2015 – 10 Ags. 2017



R. HENDRY N SAPUTRO, SH., M. Hum
Periode 07 Feb. 2018 – 21 Jan. 2021



DWI *SUGIANTO, SH.*
Periode 21 Jan. 2021 – 08 Feb. 2022

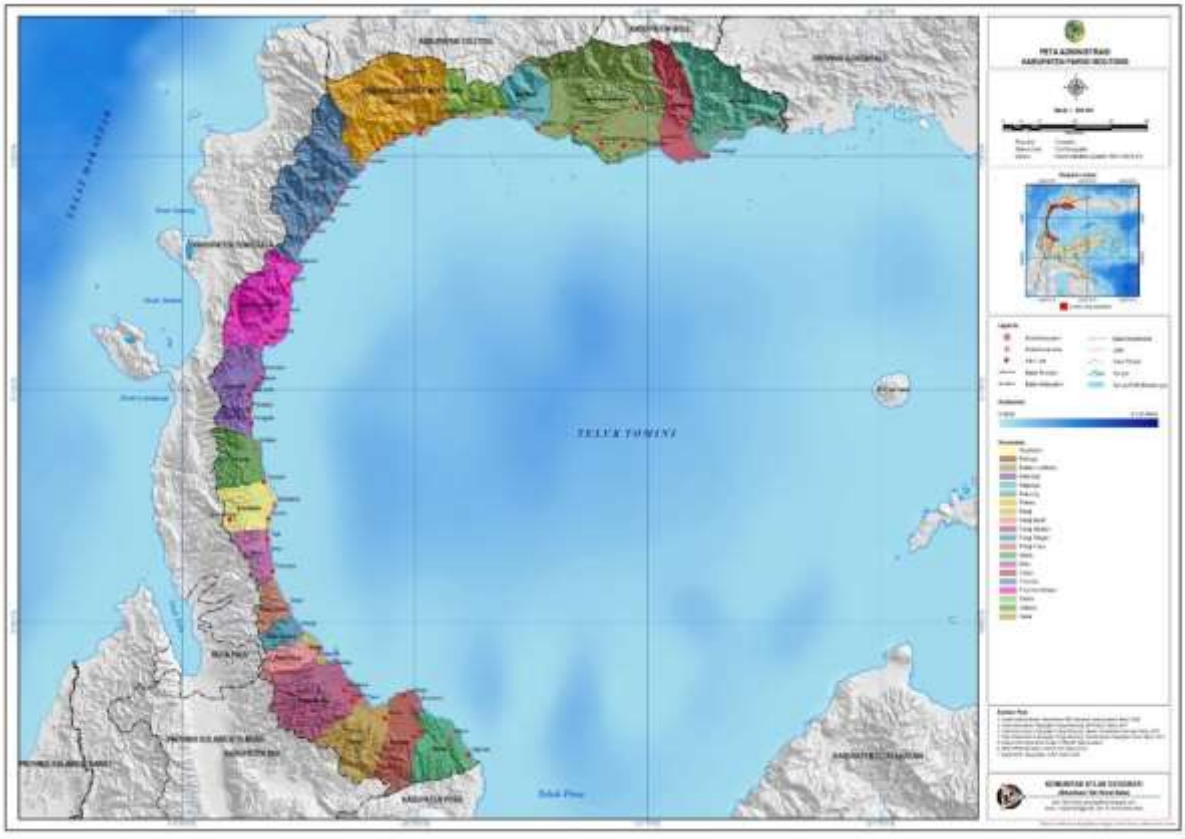


YAKOBUS MANU, S.H.
Periode 08 Feb. 2022 - Sekarang

PROFIL

Pengadilan Negeri Parigi





PROFIL PIMPINAN



KETUA PENGADILAN NEGERI PARIGI

Nama Lengkap : **YAKOBUS MANU, S.H.**

NIP : 197802032003121001

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Parigi

Pangkat : Pembina (IV/a)

TTL : Jakarta Pusat, 03 Februari 1978

Pendidikan : HUKUM Universitas Udayana Bali

RIWAYAT JABATAN

NO.	TAHUN	JABATAN
1.	2003	CPNS Pengadilan Negeri Negara
2.	2003 - 2005	PNS Pengadilan Negeri Negara
3.	2005 - 2007	Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Blambangan Umpu
4.	2007 - 2011	Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Amlapura
5.	2011 - 2014	Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Selong
6.	2014 - 2020	Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Palu
7.	2020 - 2021	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parigi
8.	2022 - Sekarang	Ketua Pengadilan Negeri Parigi

PROFIL PIMPINAN



PANITERA PENGADILAN NEGERI PARIGI

Nama Lengkap : RAHMAWATI, S.H.

NIP : 19710430 199703 2 004

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Parigi

Pangkat : Penata Tingkat I (III/d)

TTL : Ujung Pandang, 30 April 1971

Pendidikan : Sarjana Hukum (S1) Universitas Tadulako Palu

RIWAYAT JABATAN

NO.	TAHUN	JABATAN
1.	1997	CPNS Pengadilan Negeri
2.	1997-1998	PNS Pengadilan Negeri Palu 1A Palu
3.	1998 - 2002	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palu 1A Palu
4.	2002 - 2008	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palu 1A Palu
5.	2008 - 2014	Penitera Muda Hukum Pengadilan Palu 1A Palu
6.	2014 - 2022	Penitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Palu 1A Palu
7.	2022	Panitera Muda Khusus Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Palu 1A Palu
8.	2023 - Sekarang	Panitera Pengadilan Negeri Parigi

PROFIL PIMPINAN



SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI PARIGI

Nama Lengkap	INDORENUNG, S.T., S.H.
NIP	197707022009042005
Jabatan	Sekretaris Pengadilan Negeri Parigi
Pangkat d	Penata Tingkat I (III/d)
TTL	Donggala, 02 Juli 1977
Pendidikan	Teknik Informatika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

RIWAYAT JABATAN

NO.	TAHUN	JABATAN
1.	2009	CPNS Pengadilan Negeri Donggala
2.	2010	PNS Pengadilan Negeri Donggala
3.	2011 - 2012	Staf Pengadilan Negeri Donggala
4.	2012 - 2019	Staf Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
5.	2020	Pengelola Kepegawaian Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
6.	2020 - 2021	Kepala Sub Bagian Pengadilan Negeri Poso
7.	2021 - Sekarang	Sekretaris Pengadilan Negeri Parigi

FHOTO BERSAMA KELUARGA

BESAR PN PARIGI



PENGADILAN NEGERI PARIGI KELAS II

"NAGAYA"

(Netral, Akuntabel, Giat, Amanah, Yogya, Anti Korupsi)

PENGANTAR

Ketua Pengadilan Negeri Parigi

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam Sejahtera Kita Semua.



Puji dani syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 dapat kami selesaikan. Tidak pula kami sampai rasa terima kasih kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Koordinator Wilayah yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab Pengadilan Negeri Parigi selaku unit kerjanya. Demikian juga dengan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 ini adalah wadah pertanggungjawaban atas tugas-tugas selama 1 (satu) tahun terakhir yang tidak lain merupakan wujud nyata dalam meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik (*Good Govermence*). Laporan tahunan ini merupakan paparan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Parigi dalam kurun waktu sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 29 Desember 2023 (*Cut Off*), adapun pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Parigi tidak luput dari Sumber Daya Manusia, Dana, Sarana dan Prasaran yang tersedia.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 ini kami sajikan, untuk dijadikan acuan pada tahun mendatang, akhir kata kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Parigi, 10 Januari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Parigi,

Yakobus Manu, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN

PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI PARIGI KELAS II

- Keadaan Perkara Tingkat Pertama..... 12
- Keadaan Perkara Tingkat Banding..... 21
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi..... 22
- Keadaan Perkara Peninjauan Kembali..... 24

B. PENYELESAIAN PERKARA

- Jumlah Sisa Perkara Yang Putus..... 25
- Jumlah Perkara Yang Putus Tepat Waktu..... 25
- Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK 26
- Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil melalui Mediasi 26
- Jumlah Perkara Anak yang Berhasil melalui Diversi 27

C. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

C1. Posbakum 28

C2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu..... 29

C3. Perkara Prodoe (Pembebasan Biaya Perkara)..... 30

BAB III. SUMBER DAYA MANUSIA

KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/GOL./PENDIDIKAN 31

A. Mutasi 33

B. Promosi 34

C. Pensiun 35

D. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat 36

BAB IV. PENGELOLAAN KEUANGAN , SARANA DAN PRASARANAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI
A. Pengeloaan Keuangan 37
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 39
C. Pengelolaan Teknologi Informasi..... 43
BAB V. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK..... 52
A. Pembanguan Zona Integritas 55
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 62
C. Innovasi Pelayanan Publik 63
BAB VI. PENGAWASAN
A.Internal 74
B.Evaluasi 76
BAB VII. PENUTUP
A. Kesimpulan 77
B. Rekomendasi 78

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023



BAB I
PENDAHULUAN

PENGADILAN NEGERI PARIGI KELAS II

HIGHLIGHT PENGADILAN NEGERI PARIGI KELAS II TAHUN 2023



Parigi-penandatanganan pakta integritas, yang dilaksanakan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Parigi Kelas II, dihadiri oleh Seluruh Hakim, Panitera, Sekretaris, Para Panmud dan Kasubbag, Para staf serta PPNPN, disaksikan langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi Kelas II, demi tercapainya Kinerja yang baik di tahun 2023 dan menjadikan PN Parigi sesuai moto nya NAGAYA.



Pada hari Senin, tanggal 09 Januati 2023, bertempat di ruang sidang utama PN Parigi, telah diadakan kegiatan sosialisasi aplikasi e-Berpadu untuk APH se-Kabupaten Parigi Moutong. Dalam kegiatan yang dipandu Ketua PN Parigi tersebut, diperoleh beberapa kendala penegakan hukum untuk semester II Tahun 2022 dan telah disepakati rencana tindak lanjutnya. Selain itu petugas Pranata Komputer PN Parigi, Bpk. Visuddhatma Sankara, mempresentasikan penggunaan aplikasi e-Berpadu yang diikuti uji coba di web training oleh petugas IT dari instansi Polres Parigi Moutong, Kejari Parigi Moutong dan Lapas Parigi Moutong. Diharapkan memasuki tahun 2023 seluruh APH se-Kabupaten Parigi Moutong telah siap menggunakan aplikasi e-Berpadu.

Parigi-PN Parigi dan instansi pemerintah lainnya sewilayah Kabupaten Parigi Moutong mendapatkan hibah dari Pemda berupa TV, laptop, kamera dan soundaktif dalam rangka mendorong laju digitalisasi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Parigi Moutong.



Pada hari Jumat tertanggal 20 Januari 2022, Bapak Sihar Walter P., S.H. mewakili PN Parigi dalam rangka mengikuti perayaan natal 2022 dan tahun baru 2023 Persekutuan Ouikumene Polres Parigi Moutong yang dilaksanan di Gedung Gereja GKST Elim Desa Olobalu, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong.



Apel sore Jumat 13 Januari 2022, dipimpin oleh Indorenung, S.T., S.H selaku Sekretaris PN Parigi dan diikuti oleh seluruh Hakim, ASN dan PPNPN dengan amanat diharapkan kepada seluruh Aparatur Pengadilan Negeri untuk meningkatkan kinerja serta selalu menerapkan budaya 5R dan 5S

tidak lupa juga mengucap syukur atas satu minggu yg berjalan lancar dan penuh berkah.



Menindak Lanjuti permasalahan Anak yang berhadapan dengan Hukum khususnya d wilayah hukum Kabupaten PariMo, bertempat di ruang rapat Dinas Sosial Kab.Parigi Moutong, dihadiri Oleh salah satu Hakim senior yaitu YM Bpk. RIWANDI, S.H mewakili PN Parigi., dalam rangka pembentukan UPTD Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum (ABH) dan Narkoba, yang dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial Kab. Parigi Moutong, hal ini akan menjadi Program Khusus dalam Hukum dengan maraknya Kasus penyalahgunaan Obat-obatan terlarang bagi anak² dan masyarakat di wilayah Kab. Parigi Moutong.



Pada hari Senin tertanggal 6 Februari 2023 telah diadakan Rapat Koordinasi Lintas Instansi yg dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi Kelas II yakni YM Bapak Yakobus Manu, S.H., M.H. serta dihadiri oleh Plt. Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, Kalapas Kelas III Parigi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Parigi Moutong, Pekerja Sosial dari Kementerian Sosial RI dan juga Ketua LSM Badan Advokasi Indonesia (BAI) cabang Sulteng dalam rangka membahas Peningkatan Pelayanan Pendampingan Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) bertempat di ruang media center PN Parigi;



Pada hari Selasa tertanggal 7 Februari 2023, Ketua Pengadilan Negeri Parigi kelas II yakni YM Bapak Yakobus Manu, S.H., M.H. beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Parigi Moutong, menghadiri undangan apel gelar pasukan ops keselamatan Tinombala 2023 beserta kendaraan dinas yang dipimpin langsung oleh Kapolres Parigi Moutong, bertempat di halaman Mako Polres Parimo;



Pada hari Selasa tertanggal 14 Februari 2023 yg bertepatan dengan hari kasih sayang, Pengadilan

Negeri Parigi Kelas II mengadakan public campaign yang diikuti oleh seluruh Keluarga Besar PN Parigi dengan dipimpin langsung oleh YM Bapak Yakobus Manu, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Parigi Kelas II. Kegiatan ini bertujuan mensosialisasikan dan menunjukkan komitmen kuat dari Pengadilan Negeri Parigi dalam melakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta mengajak seluruh Masyarakat untuk ikut mengawali dan mengawasi pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Parigi, dalam kegiatan tersebut diawali dengan pembentangan spanduk pembangunan ZI di instansi PN Parigi serta dilanjutkan dengan pembagian Stiker kampanye anti korupsi dan Gratifikasi serta pembagian Masker pada masyarakat pengguna jalan dan di sekitar pasar. Selama proses aksi berjalan dengan lancar dan tertib serta disambut antusias oleh Masyarakat Kabupaten Parigi, khususnya para pengendara atau pengguna jalan yang tidak menggunakan masker. Selain itu tujuan mengkampanyekan anti gratifikasi dalam rangka pembangunan zona integritas Pengadilan Negeri Parigi juga dapat tersampaikan dengan baik.



Senin, tgl 20 Februari 2023, Ketua PN Parigi menerima kunjungan dari Bpk. Muh. Syahrir Azis, Kepala BAPAS Palu, beserta dengan staf, dalam rangka penjajakan kerja sama antara PN Parigi dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Palu khususnya dalam koordinasi peningkatan pelayanan pendampingan PBH dan ABH di PN Parigi.



Pada hari Jumat tertanggal 24 Februari 2023 dilaksanakan Giat wajib mingguan PN Parigi Kelas II dengan agenda minggu ini ialah jalan sehat yang diikuti seluruh Keluarga Besar PN Parigi Kelas II yang terdiri dari : Ketua PN, para Hakim, Panitera, Sekretaris, para pejabat struktural dan fungsional, staff dan PPNPN dengan tujuan tercapainya slogan Men Sana In Corpore Sano yang berarti dalam tubuh yg sehat terdapat jiwa yang kuat agar selalu maksimal dalam memberikan pelayanan Hukum bagi Masyarakat pencari Keadilan di wilayah Hukum Kabupaten Parigi Moutong ? PN Parigi NAGAYA.



Parigi, Sabtu tertanggal 25 Februari 2023 perwakilan PN Parigi yakni YM Bapak Maulana Shika Arjuna, S.H. (berdiri paling kanan dengan menggunakan pakaian Batik) menghadiri undangan dari Pondok Pesantren Ittihaadul Ummah dan Pemerintah Kecamatan Parigi yang melaksanakan kegiatan Syiar Agama dengan pembawa Hikma

yaitu Syekh Khalid Al Amri (Pembina Pondok Pesantren Nidaul Khairaat Bogor, Jawa Barat) dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW bertempat di Indoor Lapangan Futsal Toraranga.



Pada hari Selasa tertanggal 27 Februari 2023 telah dilaksanakan Rapat Bulanan dan Monitoring Evaluasi Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Parigi Kelas II sepanjang bulan Februari yang dipimpin langsung oleh YM Bapak Yakobus Manu, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Kelas II dan diikuti oleh para Hakim, Panitera, Sekretaris, seluruh pejabat struktural dan fungsional serta PPNPN bertempat d ruang sidang Utama Pengadilan Negeri Parigi Kelas II.



Parigi, Jumat tertanggal 3 Maret 2023 telah dilaksanakan peluncuran Inovasi terbaru dari PN Parigi yaitu aplikasi SIM POTOVE (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu via Elektronik) demi meningkatkan pemberian informasi teraktual yang dbutuhkan baik bagi stakeholder maupun bagi Masyarakat Pencari Keadilan selain itu juga dilaksanakan Reviu Standar Pelayanan untuk memperoleh saran dan masukan langsung dari para stakeholder yang menjadi tamu undangan (Humas Pemda Kabupaten Parimo, Humas Polres Parimo, Humas Kejari Parimo, LBH Kanoana dan Pekerja Sosial Kementerian Sosial), yang mana kedua acara tersebut di atas dipimpin langsung oleh YM Bapak Yakobus Manu, S.H., M.H selaku Ketua Pengadilan Negeri Parigi Kelas II.



Parigi, Sabtu tertanggal 4 Maret 2023 dalam rangka menyambut HUT IKAHI yang ke-70, IKAHI cabang PN Parigi Kelas II bersama dengan Forum Anak Daerah Kabupaten Parimo dan SMAN 1 Parigi bekerjasama dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Parimo dan Soal Media Parigi mengadakan Talkshow dengan tema Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan pencegahan pernikahan usia dini, diharapkan dengan diselenggarakannya acara tersebut dapat menambah wawasan hukum bagi anak di wilayah hukum PariMo serta juga dapat memotivasi para anak untuk bercita-cita menjadi profesi Yang Mulia yaitu Hakim di masa depan.



Parigi, Jumatstertanggal 10 Maret 2023 salah satu Hakim PN Pargi kelas II yaitu YM Bapak R. Heru Santoso, S.H. menjadi Narasumber dengan didampingi dan dibantu oleh para pegawai PN Parigi dalam acara pengenalan macam-macam jenis profesi kepada Anak Usia Dini khususnya profesi Hakim bertempat di TK Negeri 1 Parigi dalam rangka memenuhi surat permohonan Narasumber yang dikirimkan oleh Kepala TK Negeri 1 Parigi kepada Ketua Pengadilan Negeri Parigi.



Diinformasikan bahwa aplikasi eraterang untuk proses Surat Keterangan sudah dapat digunakan kembali.



Idul Fitri bak sinar sang surya, semarak dan semangatnya menghangatkan siapa saja. Maka izinkan Kami Keluarga Besar Pengadilan Negeri Parigi Kelas II membuka jendela dengan kata maaf agar cahayanya menembus jiwa dari rasa khilaf. Selamat hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 H, Minal Aidin Wal Faidzin mohon maaf lahir dan batin.
Kamis, 17 Agustus 2023dihadiri oleh Seluruh Hakim, Panitera, Sekretaris, Para Panmud dan Kasubbag, Para staf serta PPNPNbertempat di Kantor Pengadilan Negeri Parigi diadakan Upacara dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Indonesia yang Ke-78.



Pada hari Sabtu 19 Agustus 2023 Bertempat di halaman kantor Pengadilan Negeri Parigi dihadiri oleh Seluruh Hakim, Panitera, Sekretaris, Para Panmud dan Kasubbag, Para staf serta PPNPN pelaksanaan Upacara dalam rangka memperingati HUT Mahkamah Agung ke-78 dan dilanjutkan dengan acara pemotongan tumpeng





Jumat, 6 Oktober 2023, bertempat di Kantor PN Parigi, telah dilaksanakan kegiatan koordinasi dan monitoring evaluasi pelaksanaan panggilan dan pemberitahuan pos tercatat, antara Kepaniteraan PN Parigi dengan perwakilan Kantor Pos Parigi.



Parigi, 26-27 Oktober 2023. Telah dilaksanakan kegiatan Pengawasan dan Pembinaan oleh Tim Pengawas Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang dipimpin oleh KPT YM Ibu Dr Hj Nirwana S.H., M.Hum dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri, Para Hakim, Panitera, Sekretaris, Para Panmud dan Kasub, ASN dan PPNPN.



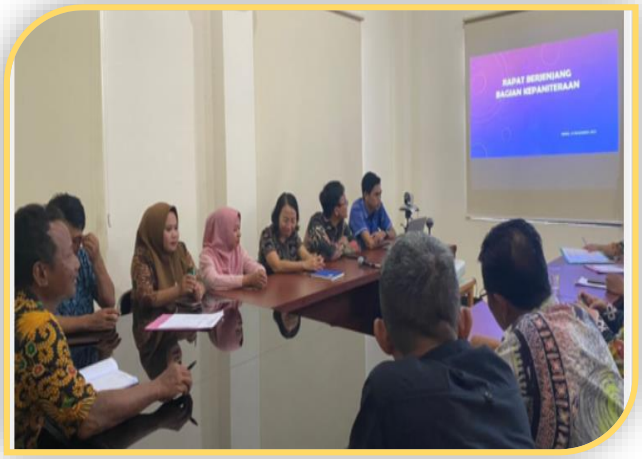
Parigi, 28 Oktober 2023. Telah dilaksanakan Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-95 bertindak sebagai Inspektur Upacara Ketua Pengadilan Negeri Parigi YM Bapak Yakobus Manu, S.H yang dihadiri oleh Seluruh Hakim, Panitera, Sekretaris, Para Panmud dan Kasubbag, Para staf serta PPNPN/PSG.



Parigi, 10 November 2023. Upacara dalam memperingati Hari Pahlawan dengan Pembina Upacara YM Angga Nugraha Agung,S.H dan Komandan Pasukan Sihar Walter Palmarum,S.H dihadiri oleh Seluruh Hakim, Panitera, Sekretaris, Para Panmud dan Kasubbag, Para staf serta PPNPN dan Siswa/i PSG.



Parigi, Rabu 22 November 2023. Bagian Kesekretariatan melaksanakan rapat berjenjang diruang media center Pengadilan Negeri Parigi.



Parigi, Kamis 23 November 2023. Para Pimpinan Pengadilan Negeri Parigi melaksanakan rapat berjenjang diruang media center Pengadilan Negeri Parigi.



Parigi, Senin 27 November 2023. 3 orang Analis Perkara Peradilan PN Parigi telah mengikuti seleksi substansi hukum dalam rangka seleksi calon hakim. Selanjutnya ketiga Analis Perkara tersebut Abednego,S.H., Ryvanuel Juangsa Simbolon,S.H., dan Sihar Walter Palmarum,S.H., akan mengikuti tahapan wawancara.



Rabu, 29 November 2023, Bpk. Abednego Manulang, S.H. mewakili Ketua PN Parigi, menghadiri kegiatan Pembukaan Pesparawi ke-IV Kabupaten Parigi Moutong, yang diselenggarakan di GPID Pniel Tanalanto, dengan tema: "Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan (Mazmur 150)".

Kegiatan tersebut dibuka oleh Pj. Bupati Kabupaten Parigi Moutong, Bpk. Richard A. Djanggola, S.E., M.S.A., serta dihadiri unsur Forkompinda Kabupaten Parigi Moutong. Dalam pidatonya, Pj. Bupati Parigi Moutong mengharapkan kegiatan Pesparawi ini dapat menjadi sarana pemersatu bangsa untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan, serta meningkatkan penghargaan terhadap keberagaman masyarakat Parigi Moutong menuju Indonesia maju.



Parigi, 12 Desember 2023. Bertempat di Media Center Pengadilan Negeri Parigi telah dilaksanakan koordinasi Prototipe Gedung Kantor dan Rumah Dinas bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Parigi Moutong.



Parigi, 11 Desember 2023. YM Ketua Pengadilan Negeri Parigi menerima siswi PSG Jurusan Akuntansi dari SMKN 1 Parigi



Parigi, Jumat 15 Desember 2023. Ketua Pengadilan Negeri Parigi, YM Bapak Yakobus Manu dan Majelis melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) di 4 Lokasi yaitu : 1 kota nagaya; 2 desa trimuspasari; 3 desa kayu agung; 4 desa ranang

Parigi, 15 Desember 2023. Perwakilan Pengadilan Negeri Parigi YM Maulana Shika Arjuna, SH., mengikuti undangan kegiatan penutupan pelatihan anti huru hara dan pengendalian massa dalam rangka persiapan pemilu dan pilkada tahun 2024



Parigi, 15 Desember 2023. Kegiatan Jumat Bersih yang diikuti oleh seluruh ASN, PPNPN dan siswi PSG.



Parigi, 18 Desember 2023. Pengadilan Negeri Parigi kelas II Membuka Seleksi Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum. Pendaftaran di buka dari tanggal 19-21 Desember 2023 berkas dikumpulkan di bagian PTSP Hukum 2023



Senin, 18 Desember 2023, Ketua PN Parigi menghadiri undangan perayaan Natal bersama Bimas Kristen Kemenag Parigi Moutong dan Warga Binaan serta Pegawai Lapas Kelas III Parigi, bertempat di ruang serba guna Lapas Kelas III Parigi di Olaya, dengan tema: "Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi (Lukas 2:14)" dan sub tema: "Mari memuliakan Tuhan dan menghadirkan damai sejahtera dalam hidup bersama dengan semua ciptaan."



Parigi, 19 Desember 2023. Bertempat di Command Center Pengadilan Negeri Parigi telah dilaksanakan Musyawarah IKAHI Cabang Parigi.



Kamis, 21 Desember 2023, bertempat di Mapolres Parigi Moutong, sekitar Pukul 08.30 WITA, Ketua PN Parigi, YM Bpk. Yakobus Manu, S.H., mengikuti kegiatan apel gelar pasukan Operasi Lilin Tinombala 2023 dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Parigi Moutong, serta pemusnahan hasil Operasi Pekat dan barang bukti Narkotika.



Jumat, 22 Desember 2023. Pengantar Alih Tugas Panitera Pengadilan Negeri Parigi Kelas II. Bapak I Ketut Sueca, SH. Sebagai Panitera Pengadilan Negeri Situbondo Kelas 1B Semoga Semakin Sukses ditempat kerja yang baru



Pimpinan dan segenap jajaran PN Parigi Kelas II, mengucapkan : Selamat Hari Ibu kepada para Ibu kami yang tersayang. Terima kasih untuk cinta, dukungan dan pengorbananmu. Engkau adalah pahlawan sejati dalam hidupku.

Ketua PN Parigi Kelas II dan Ketua Dharmayukti Karini Cabang Parigi mengucapkan: selamat hari Natal tanggal 25 Desember 2023 dan Tahun Baru 2024. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi!



Jumat, 29 Desember 2023. Pelantikan Panitera Pengadilan Negeri Parigi Kelas II. Sdri. Rahmawati, SH



Jumat, 29 Desember 2023

Pengantar Alih Tugas Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Parigi Kelas II. Bapak Muhammad Taslim Thahir, S.H. Sebagai Panitera Pengganti PT Sulawesi Tengah. Semoga Semakin Sukses ditempat kerja yang baru



Jumat, 29 Desember 2023

Pengadilan Negeri Parigi Kelas II melaksanakan kegiatan family gathering guna mempererat keakraban antara para pegawai



PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pada era reformasi lembaga peradilan dituntut lebih transparan dan profesional dibidang hukum, dengan perbaikan – perabaikan di segala bidang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI diharapkan lembaga peradilan dimata masyarakat umum tidak lagi menakutkan, akan tetapi menjadi pelindung dan pengayom masyarakat dalam mencari keadilan. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Parigi Kelas II telah melaksanakan serangkaian kebijakan yang merupakan upaya tindak lanjut dari kebijakan umum yang telah dicanangkan dan diperintahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sesuai dengan cetak biru Mahkamah Agung 2010-2035 diperlukan usaha untuk mewujudkan sebuah Badan Peradilan yang Agung dengan :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
2. Didukung pengelola anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proposional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manjemen organisasi yang jelas dan terukur
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana,cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proposioanal.
5. Mengelola sarana dan prasaranan dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.
8. Berorintentasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manjemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis Teknologi Infrormasi terpadu.

Selain hal diatas sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI dalam Agenda Pembaruannya, maka Pengadilan Negeri Parigi Kelas II berfokus pada pelayanan publik, dan beberapa kebijakan yang merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya terutama yang menyangkut tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan terdapat program prioritas, antara lain adalah :

1. Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

a. Website Pengadilan Negeri Parigi Kelas II

Dengan adanya SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 maka peda Pengadilan Negeri Parigi Kelas II juga telah membuat website PN parigi dengan alamat : www.pn-parigi.go.id dimana website tersebut memberikan informasi kepada masyarakat pencari keadilan secara aktual dan akurat.

b. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

SIPP di Pengadilan Negeri Parigi Kelas II juga telah disinkronisasikan dengan website Pengadilan Negeri Parigi Kelas II, sehingga masyarakat pencari keadilan dapat mengakses untuk mencari informasi perkara yang sedang berjalan secara langsung. Aplikasi SIPP tersebut dapat langsung diakses di www.sipp.pn-parigi.go.id

c. E-Court Mahkamahh Agung

E-Court Mahkamah Agung adalah suatu aplikasi dari Mahkamah Agung yang memungkinkan untuk mendaftarkan perkara hingga persidangan secara online. Keunggulan dari e-court adalah adanya fasilitas e-filling (pendafatarm secara online),e-paymenet (pembayaran perkara secara online), e-summon (pemanggilan secara online) dan e-litigasi (persidangan secara online).

2. Program Penyelesaian Perkara

Pada tahun 2023 upaya percepatan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Parigi Kelas II terus-menerus dilakukan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 masih menjadi acuan dalam penyelesaian perkara, yaitu penyelesaian perkara tingkat pertama paling lambat 5 bulan. Untuk mendukung tercapainya percepatan

penanganan perkara di Pengadilan Negeri Parigi Kelas II pada tahun 2023 Ketua Pengadilan Negeri Parigi Kelas II mengeluarkan kebijakan yaitu :

a. Memastikan kesiapan konsep putusan dan berita acara sebelum putusan dibacakan
b. Optimalisasi pelaksaaan sidang sesuai jadwal yang ditentukan dalam court calender
c. Meningkatkan kepatuhan pegawai dalam pengisian data dan dokumen pada SIPP.
d. Mengimplementasikan administasi perkara secara elektronik (e-Court)
e. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Meja PTSP.

3. Pengawasan Rutin/Reguler

Pengadilan Negeri Parigi Kelas II terus melaksanakan pengawasan rutin/reguler, yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang Terhadap Bagian Kepaniteraan maupun Bagian Kesekretariatan yang berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Pengawasan rutin/reguler dilakukan dengan cara pemeriksaan secara lengkap menyeluruh terhadap semua aspek pada bagian-bagian oleh Hakim Pengaawas Bidang setiap bulan dan selanjutnya memberikan hasil pengawasan kepada Wakil Ketua selaku Koordinator Pengawas. Selanjutnya laporan pengawasan di serahkan kepada Ketua Pengadilan sebagai bahan dalam rapat dinas bulanan yang rutin setiap bulan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Parigi Kelas II.

B. WILAYAH YURISDIKSI

Kabupaten Parigi Moutong adalah salah satu kabupaten yang ada di Propinsi Sulawesi Tengah yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Donggala dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Gorontalo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Poso;
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Teluk Tomini;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Donggala dan Kota Palu;

Secara umum wilayah Kabupaten Parigi Moutong terdiri dari pesisir pantai dan pegunungan dengan pendapatan masyarakatnya di dominasi dari hasil pertanian. Bahwa sebelum Pengadilan Negeri Parigi di bentuk, perkara di wilayah Hukum Kabupaten Parigi Moutong ditangani oleh Pengadilan Negeri Donggala.

Untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada Masyarakat pencari keadilan yang ada di Wilayah Hukum Kabupaten Parigi Moutong maka Pengadilan Negeri Parigi di bentuk melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Balige, Pengadilan Negeri Masamba, Pengadilan Negeri Saumlaki, Pengadilan Negeri Ranai, Pengadilan Negeri Prabumulih, Pengadilan Negeri Pagar Alam, Pengadilan Negeri Kasongan, **Pengadilan Negeri Parigi**, Pengadilan Negeri Bintuhan, Pengadilan Negeri Tais, Pengadilan Negeri Malili, Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Pengadilan Negeri Amurang, Pengadilan Negeri Kepahiang, Pengadilan Negeri Tubei dan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

Bahwa Pengadilan Negeri Parigi diresmikan secara kolektif bersama peresmian Pengadilan Negeri Balige, Pengadilan Negeri Masamba, Pengadilan Negeri Saumlaki, Pengadilan Negeri Ranai, Pengadilan Negeri Prabumulih, Pengadilan Negeri Pagar Alam, Pengadilan Negeri Kasongan, Pengadilan Negeri Bintuhan, Pengadilan Negeri Tais, Pengadilan Negeri Malili, Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Pengadilan Negeri Amurang, Pengadilan Negeri Kepahiang, Pengadilan Negeri Tubei dan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 03 Desember 2008.

Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Parigi yang pertama adalah Alexander Sampewai Palumpun, SH.,MH yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 13/Dju/SK/MH/XI/2008 tanggal 21 November 2008 yang di sumpah dan dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada tanggal 11 Desember 2008. Awalnya Pengadilan Negeri Parigi berkantor di Ruang Sidang (Zeeting Plat) Pengadilan Negeri Palu yang ada di Parigi dengan alamat Jalan Trans Sulawesi No. Kelurahan Bantaya Parigi dan kemudian pada awal januari 2013, Kantor Pengadilan Negeri Parigi pindah ke gedung baru yang terletak di Jalan S. Pakabata No. Parigi Desa Bambalemo, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong.

Bahwa Pengadilan Negeri Parigi secara resmi beroperasi sejak tanggal 31 Desember 2008, yang diawali dengan pelantikan Para Pejabat, yaitu :

- Panitera / Sekretaris : Rapiuddin, SH.
- Wakil Panitera : I Ketut Sueca, SH.
- Panitera Muda Pidana : Ady Yayan Saswanto, SH.
- Panitera Muda Perdata : Marolop Sinaga, SH.
- Panitera Muda Hukum : Rosmaida Goeltom

Awal beroperasinya Pengadilan Negeri Parigi, Hakim yang melaksanakan tugas di Pengadilan Negeri Parigi hanya 2 (dua) orang yaitu Ketua Pengadilan Negeri Parigi dan Sdr. Wiryatmo Lukito Totok, SH. Pada Bulan Februari 2009, Pengadilan Negeri Parigi mendapat ketambahan Hakim yang melaksanakan tugas yaitu Doni Hardiyanto, SH dan Ranto Sabungan Silalahi, SH yang kemudian di susul oleh Hakim Yuri Adriansyah, SH dan Bulan Juni 2009 Pranoto, SH disumpah dan dilantik sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parigi yang pertama. Jabatan struktural dan fungsional lainnya terisi sejak Bulan Februari 2009 dengan dilantiknya Sunarto Mait, ST sebagai Kepala Urusan Kepegawaian dan Marturasi Pakpahan sebagai Jurusita Pengganti.

Pada awal beroperasinya Pengadilan Negeri Parigi, terdapat banyak kekurangan seperti kekurangan pegawai / staf sehingga untuk melaksanakan tugas sehari-hari di Pengadilan Negeri Parigi belum maksimal. Bahkan Pada Tahun Anggaran 2009 Pengadilan Negeri Parigi belum memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kami selaku Ketua Pengadilan Negeri Parigi memohon partisipasi rekan-rekan Hakim dan Pansek untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut secara suka rela, terutama kebutuhan ATK. Bahwa Pengadilan Negeri Parigi pertama kalinya mendapat dana untuk biaya operasional pada Bulan Oktober 2011 yang di titipkan pada DIPA Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang kemudian mulai Tahun Anggaran 2010 Pengadilan Negeri Parigi sudah memiliki DIPA tersendiri.

Mulai Tahun Anggaran 2010, Pengadilan Negeri Parigi telah mendapat anggaran untuk Pembangunan Gedung Kantor Tahap I yang peletakan batu pertamanya dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2010 oleh Ketua Pengadilan Tinggi

Sulawesi Tengah dan gedung kantor baru tersebut dibangun 3 (tiga) tahap sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 dan awal Bulan Januari 2013 Kantor Pengadilan Negeri Parigi berpindah tempat di gedung baru. Gedung kantor baru tersebut didirikan diatas lahan seluas ± 2 HA yang merupakan tanah hibah dari Pemeritah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

C. VISI, MISI, BUDAYA KERJA DAN MOTTO

1) Visi dan Misi

VISI Pengadilan Negeri Parigi Kelas II sesuai dengan Visi Mahkamah Agung RI :

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PARIGI KELAS II YANG AGUNG"

Misi Pengadilan Negeri Parigi Kelas II juga sesuai dengan Misi Mahkamah Agung RI :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Parigi Kelas II
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Parigi Kelas II
4. Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Parigi Kelas II

2) Budaya Kerja

Nilai-nilai budaya kerja yang dianut dan mendasari setiap langkah dalam penyelesaian tugas di Pengadilan Negeri Parigi Kelas II berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, yaitu segenap pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku :

- Adil dan tidak diskriminatif
- Cermat
- Santun dan ramah
- Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut
- Profesional
- Tidak mempersulit
- Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar
- Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi Pengadilan Negeri Parigi

- Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku
- Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan
- Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik
- Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat
- Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki
- Sesuai dengan kepantasan; dan
- Tidak menyimpang dari prosedur.

3) Motto

Motto Pengadilan Negeri Parigi adalah “NAGAYA”
N : etral

A : kuntabel

G : iyat

A : Amana

Y : ogiya

A : Anti Korupsi

D. RENSTRA

Mengacu pada visi dan misi Pengadilan Negeri Parigi tersebut diatas, maka langkah-langkah operasional yang dilakukan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauhmana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para Pegawai juga

mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimal nya pelayanan(cleint service), baik internal maupun secara eksternal kepada para pencari keadilan.

Kualitas keterampilan (skill) pegawai selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing- masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Negeri Parigi adalah terus tersusun dan terprogram setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Strategis (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan Tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan terukur, suatu perencanaan yang strategis diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan. Untuk mewujudkan itu pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2023 di Pengadilan Negeri Parigi telah ditetapkan sasaran/keluaran kegiatan yang mengacu para program dan fungsinya tersebut.

Rencana strategis (renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu. Adapun sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijaksanaan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Parigi tahun 2023 telah disusun secara tepat, dinamis, sistematis, dan berkelanjutan. Sebagai suatu proses perencanaan panjang dibidang keperkaraan dan administrasi harus memiliki arah yang konsisten agar tidak terombang ambing dalam perubahan situasi. Dalam kondisi ketersediaan kualitas sumber daya manusia, sarana, dan prasarana, namun dukungan anggaran kurang cukup memadai, Pengadilan Negeri Parigi menyusun Renstra secara efektif dan

efisien. Renstra ini dituangkan dalam suatu perencanaan kinerja tahunan (annual performance plan) sebagai penjabaran lebih lanjut yang memuat seluruh target kinerja dalam satu tahun yang juga dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja utama (key performance indicators).

Sistem akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Parigi setidaknya memiliki empat fase penting yang membentuk siklus akuntabilitas kerja yang tidak terputus dan terpadu. Keempat fase tersebut mencakup: (1) penyusunan rencana strategis; (2) pengukuran kinerja; (3) pelaporan kinerja; dan (4) pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja berkesinambungan. Beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit organisasi/instansi melalui tahap persiapan rencana, yaitu : mengidentifikasikan, menganalisa dan merumuskan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan. Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran yaitu mengkoordinasikan penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran, memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran, menetapkan sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan ke dalam rancangan satuan, menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran.

Untuk mengimplementasikan Renstra yang telah disusun, Pengadilan Negeri Parigi kemudian menjabarkannya dalam Penetapan Kinerja Tahunan. Dalam Penetapan Kinerja Tahun 2023, telah ditetapkan beberapa sararan yang hendak dicapai. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Parigi adalah sebagai berikut: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel, Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dan Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Untuk mewujudkan perubahan Indikator (IKU) masih diperlukan banyak persiapan-persiapan diantaranya dibutuhkan waktu untuk pembentukan Tim untuk merumuskan dan menyamakan atas presepsi dari Indikator Kinerja Utama tersebut, agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan capaian capaian dalam Indikator dimaksud.

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai secara substansial dari visi dan misi Pengadilan Negeri Parigi adalah:

1) Meningkatnya akselarasi pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.
2) Meningkatnya tingkat pendidikan aparatur peradilan pada Pengadilan Negeri Parigi.
3) Meningkatnya moralitas dan integritas aparatur Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Parigi.
4) Meningkatnya kualitas aparatur pendukung Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Parigi.
5) Meningkatnya kinerja pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Negeri Parigi.
6) Meningkatnya tingkat kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Parigi.
7) Meningkatnya kualitas administrasi dan managemen Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Parigi di bidang kepegawaian, keuangan, umum dan Teknologi Informasi dan Pelaporan.
8) Meningkatnya sarana dan prasarana Hukum pada Pengadilan Negeri Parigi.

2. Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai seperti yang telah dirumuskan di atas, dijabarkan melalui penetapan sasaran yang ingin dicapai, yaitu :

1) Tersedianya pelayanan hukum masyarakat.
2) Terwujudnya transparansi penyelenggaraan peradilan.
3) Terwujudnya penyelesaian perkara yang cepat.
4) Terselenggaranya peradilan yang sederhana dan biaya ringan.
5) Tersedianya tingkat pendidikan aparatur yang memadai.
6) Terwujudnya kinerja peradilan yang memadai.
7) Tersedianya aparatur yang bersih dan berwibawa.
8) Tersedianya Aparatur pendukung peradilan yang bersih, handal dan professional
9) Terwujudnya peradilan yang bebas KKN dan berwibawa

10) Terwujudnya keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan
11) Tersedianya jumlah, kualitas dan kesejahteraan pegawai
12) Terwujudnya administrasi dan managemen kepegawaian
13) Tersedianya platfon anggaran DIPA dan realisasi DIPA
14) Terwujudnya administrasi dan managemen keuangan
15) Terwujudnya tertib administrasi dan managemen umum dan rumah tangga
16) Terpeliharanya sarana dan prasarana yang lebih baik dan memadai
17) Terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai.

3. Kebijakan dan Program

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja dengan merujuk pada visi dan misi, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, telah ditetapkan kebijakan dan program yaitu :

a) Kebijakan

- Meningkatkan kualitas mutu pelayanan prima
- Meningkatkan kualitas pengawasan pelayanan
- Melarang mengambil pungutan di luar dari ketentuan
- Meningkatkan kualitas mutu pengawasan, pengendalian dan pembinaan
- Peningkatan jumlah, kualitas dan kesejahteraan pegawai
- Penertiban administrasi dan managemen SDM
- Penertiban administrasi dan managemen keuangan
- Peningkatan tertib administrasi umum
- Melaksanakan pemeliharaan barang inventaris negara
- Mengadakan pengadaan barang inventaris negara

b) Program

Pelaksanaan kebijakan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) di atas akan diimplementasikan melalui tiga program pokok, yaitu :

- Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MahkamahAgung.
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung.
- Program peningkatan manajemen peradilan umum.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023



BAB II
KEADAAN PERKARA

PENGADILAN NEGERI PARIGI

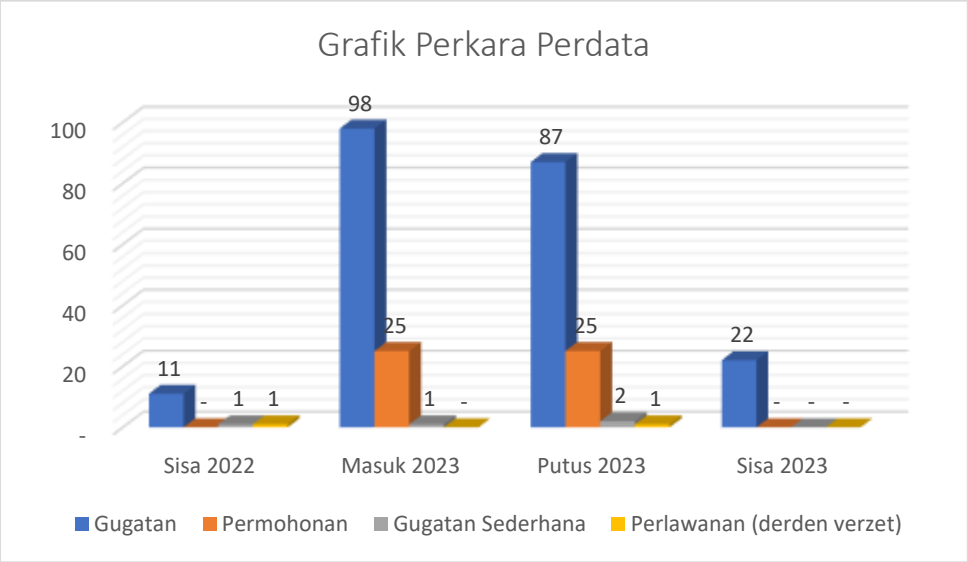
A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI PARIGI

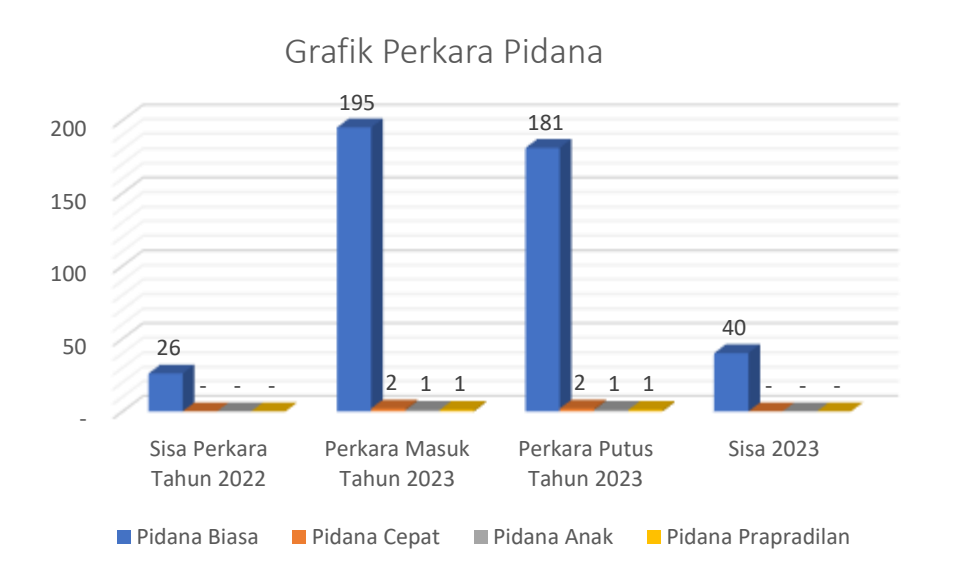
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Tugas pokok dan Fungsi adalah Pengadilan Negeri Parigi adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya. Untuk dapat mengetahui tugas pokok dan fungsi tersebut perlu dilakukan penilaian sampai sejauh mana capaian penyelesaian pekera tersebut dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Parigi.

Keadaan Perkara Tingkat Pertama

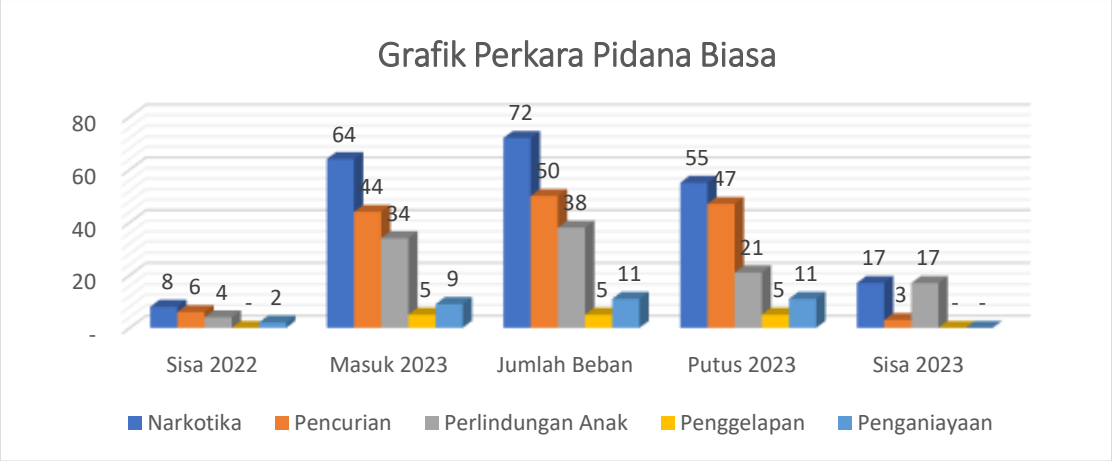
No	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2022	Perkara Masuk Tahun 2023	Perkara Putus Tahun 2023	Sisa Perkara
	PERDATA				
1	Gugatan	11	98	87	20
2	Permohonan	-	25	25	-
3	Gugatan Sederhana	1	1	2	-
4.	Perlawanan/Bantahan (Derden Verzet)	1	-	1	-
	Total Perdata	13	124	115	20
	PIDANA				
1	Pidana Biasa	26	195	181	40
2	Pidana Cepat	-	2	2	-
4	Pidana Anak	-	1	1	-
5	Pidana Praperadilan	-	1	1	-
	Total Pidana	26	199	185	40
	Jumlah Perkara Perdata dan Pidana	67	323	300	60

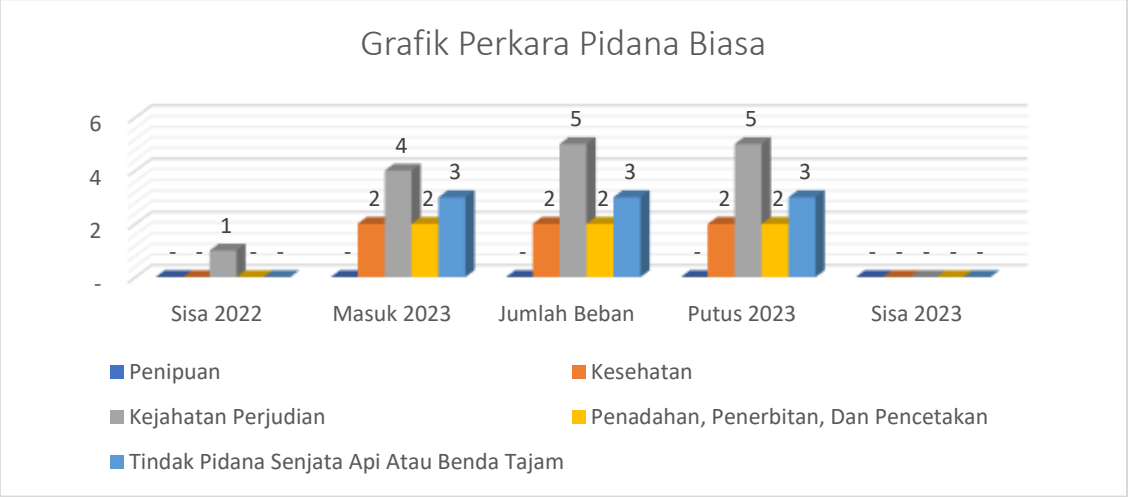

Grafik Perkara Perdata
100
80
60
40
20
-
11
-
1
1
98
25
1
-
87
25
2
1
22
-
-
-
Sisa 2022
Masuk 2023
Putus 2023
Sisa 2023
Gugatan
Permohonan
Gugatan Sederhana
Perlawanan (derden verzet)

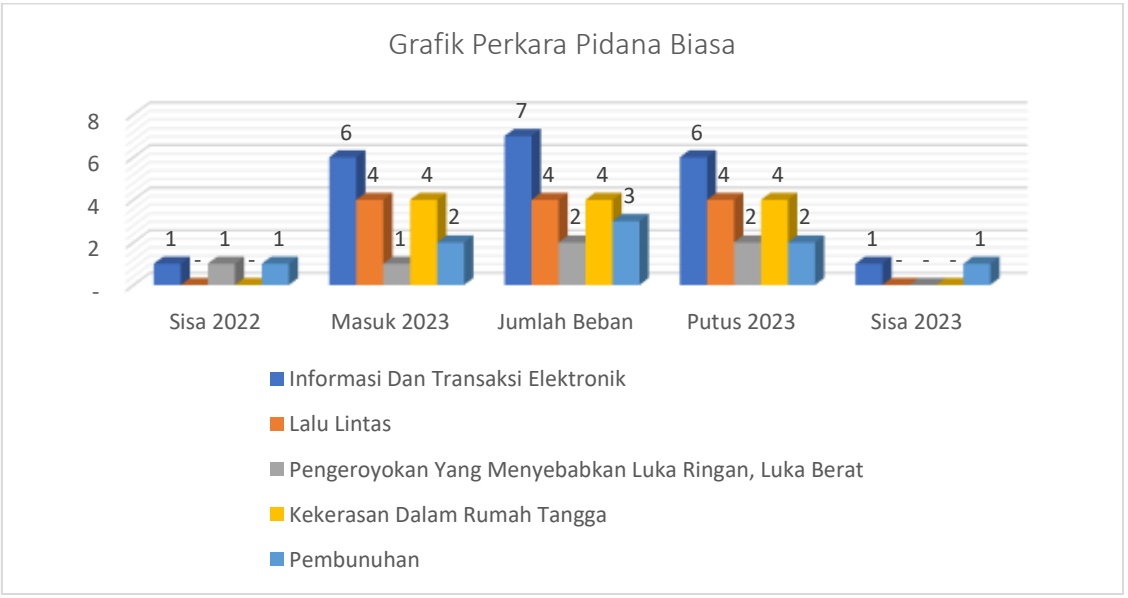

Grafik Perkara Pidana
200
150
100
50
-
26
-
-
-
195
2
1
1
181
2
1
1
40
-
-
-
Sisa Perkara Tahun 2022
Perkara Masuk Tahun 2023
Perkara Putus Tahun 2023
Sisa 2023
Pidana Biasa
Pidana Cepat
Pidana Anak
Pidana Prapradilan

Keadaan Perkara Pidana Biasa pada Pengadilan Negeri Parigi berdasarkan klasifikasi perkara

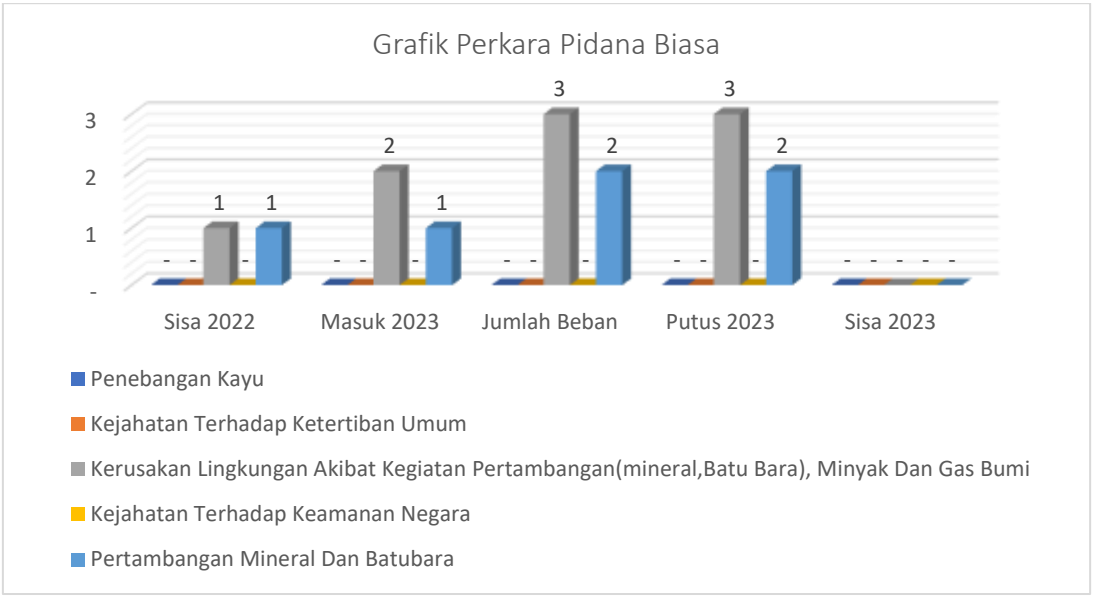
No	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa 2023
1	Narkotika	8	64	72	55	17
2	Pencurian	6	44	50	47	3
3	Perlindungan Anak	4	34	38	21	17
4	Penggelapan	-	5	5	5	-
5	Penganiayaan	2	9	11	11	-
6	Penipuan	-	-	-	-	-
7	Kesehatan	-	2	2	2	-
8	Kejahatan Perjudian	1	4	5	5	-
9	Penadahan, Penerbitan, Dan Pencetakan	-	2	2	2	-
10	Tindak Pidana Senjata Api Atau Benda Tajam	-	3	3	3	-
11	Informasi Dan Transaksi Elektronik	1	6	7	6	1
12	Lalu Lintas	-	4	4	4	-
13	Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka Ringan, Luka Berat	1	1	2	2	-
14	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	-	4	4	4	-
15	Pembunuhan	1	2	3	2	1
16	Pemalsuan Surat	-	-	-	-	-
17	Kejahatan Terhadap Kesusilaan	-	2	2	2	-
18	Penghancuran Atau Perusakan Barang	-	1	1	1	-
19	Kejahatan Terhadap Nyawa	-	-	-	-	-
20	Pemerasan Dan Pengancaman	-	-	-	-	-
21	Penebangan Kayu	-	-	-	-	-
22	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	-	-	-	-	-
23	Pertambangan(mineral,Batu Bara), Minyak Dan Gas Bumi	1	2	3	3	-
24	Kejahatan Terhadap Keamanan Negara	-	-	-	-	-
25	Pertambangan Mineral Dan Batubara	1	1	2	2	-
26	Perbuatan Curang	-	-	-	-	-
27	Pengancaman	-	-	-	-	-
28	Orang Atau Barang	-	-	-	-	-
29	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	-	1	1	-	1
30	Pemalsuan Mata Uang Dan Uang Kertas	-	-	-	-	-
31	Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian	-	-	-	-	-
32	Pelanggaran Kesusilaan	-	-	-	-	-
33	Perbuatan Tidak Menyenangkan	-	-	-	-	-
34	Konservasi Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-
35	Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang	-	-	-	-	-
36	Tentang Perikanan	-	2	2	2	-
37	Lain-lain	-	2	2	2	-
Jumlah		26	195	221	181	40

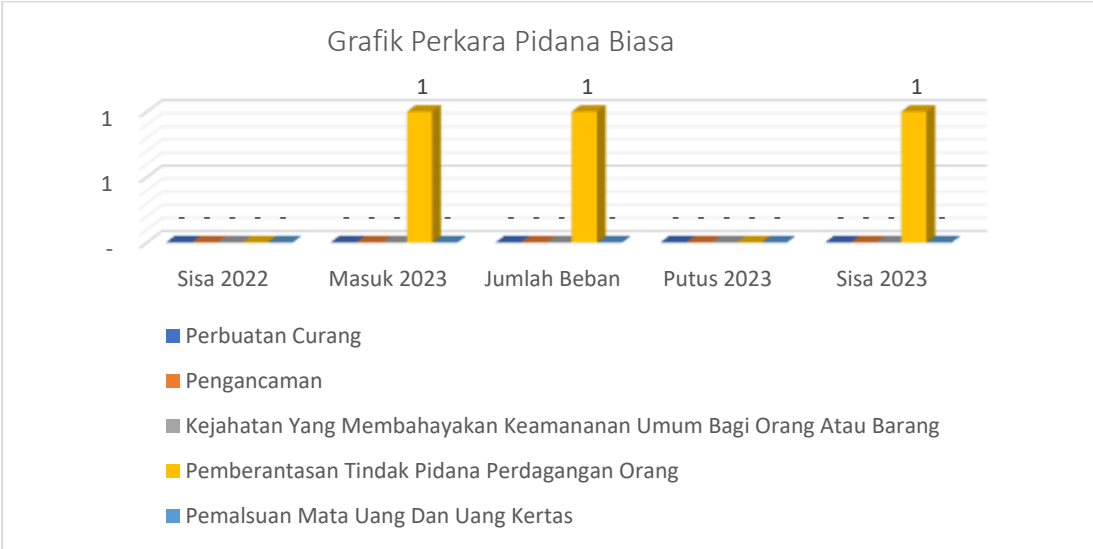

Grafik Perkara Pidana Biasa
80
60
40
20
-
8 6 4 - 2
64 44 34 5 9
72 50 38 5 11
55 47 21 5 11
17 3 17 - -
Sisa 2022
Masuk 2023
Jumlah Beban
Putus 2023
Sisa 2023
Narkotika
Pencurian
Perlindungan Anak
Penggelapan
Penganiayaan


Grafik Perkara Pidana Biasa
6
4
2
-
- - 1 - -
- 2 4 2 3
- 2 5 2 3
- 2 5 2 3
- - - - -
Sisa 2022
Masuk 2023
Jumlah Beban
Putus 2023
Sisa 2023
Penipuan
Kesehatan
Kejahatan Perjudian
Penadahan, Penerbitan, Dan Pencetakan
Tindak Pidana Senjata Api Atau Benda Tajam


Grafik Perkara Pidana Biasa
8
6
4
2
-
1 - 1 - 1
6 4 1 4 2
7 4 2 4 3
6 4 2 4 2
1 - - - 1
Sisa 2022
Masuk 2023
Jumlah Beban
Putus 2023
Sisa 2023
Informasi Dan Transaksi Elektronik
Lalu Lintas
Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka Ringan, Luka Berat
Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Pembunuhan

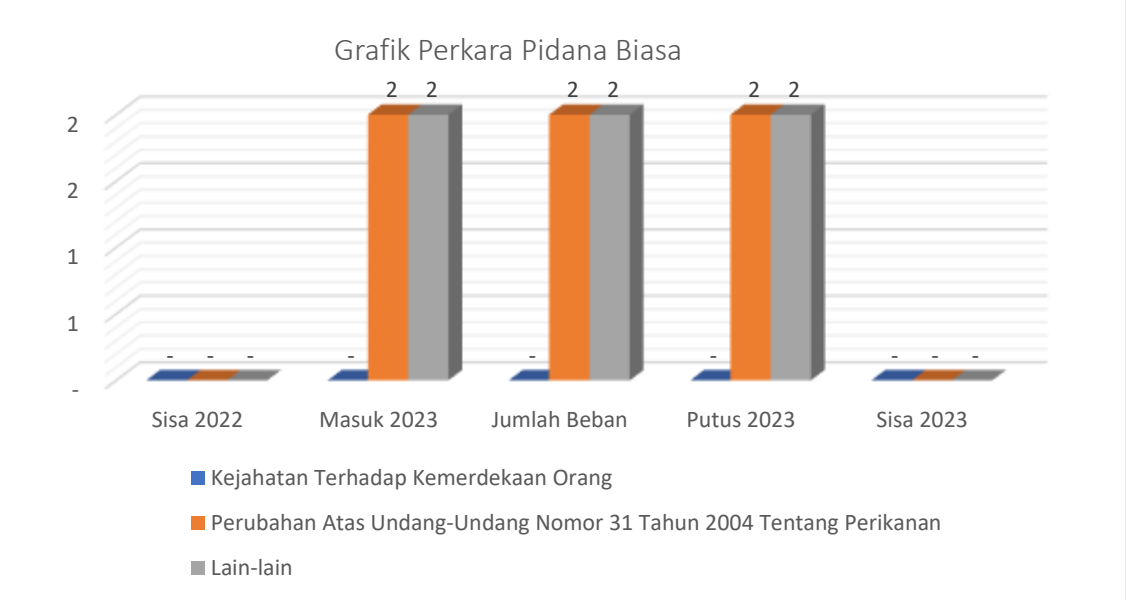

Grafik Perkara Pidana Biasa
2
1
-
2
1
2
1
2
1
Sisa 2022
Masuk 2023
Jumlah Beban
Putus 2023
Sisa 2023
Pemalsuan Surat
Kejahatan Terhadap Kesusilaan
Penghancuran Atau Perusakan Barang
Kejahatan Terhadap Nyawa
Pemerasan Dan Pengancaman


Grafik Perkara Pidana Biasa
3
2
1
-
1
1
2
1
3
2
3
2
Sisa 2022
Masuk 2023
Jumlah Beban
Putus 2023
Sisa 2023
Penebangan Kayu
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum
Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan(mineral,Batu Bara), Minyak Dan Gas Bumi
Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
Pertambangan Mineral Dan Batubara


Grafik Perkara Pidana Biasa
1
1
-
1
1
1
Sisa 2022
Masuk 2023
Jumlah Beban
Putus 2023
Sisa 2023
Perbuatan Curang
Pengancaman
Kejahatan Yang Membahayakan Keamananan Umum Bagi Orang Atau Barang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Pemalsuan Mata Uang Dan Uang Kertas

.

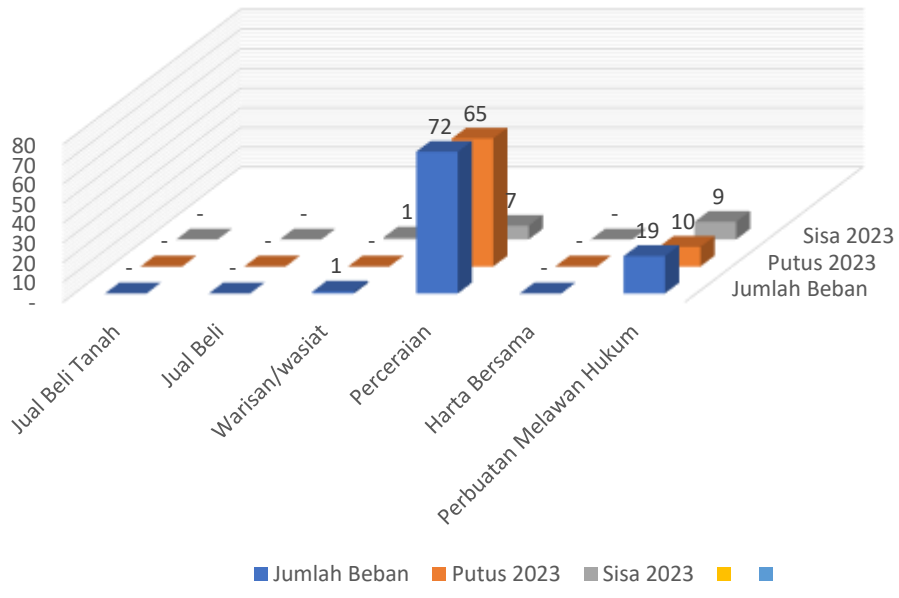

Grafik Perkara Pidana Biasa
1
1
1
0
0
-
Sisa 2022
Masuk 2023
Jumlah Beban
Putus 2023
Sisa 2023
Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian
Pelanggaran Kesusilaan
Perbuatan Tidak Menyenangkan
Konservasi Sumber Daya Alam

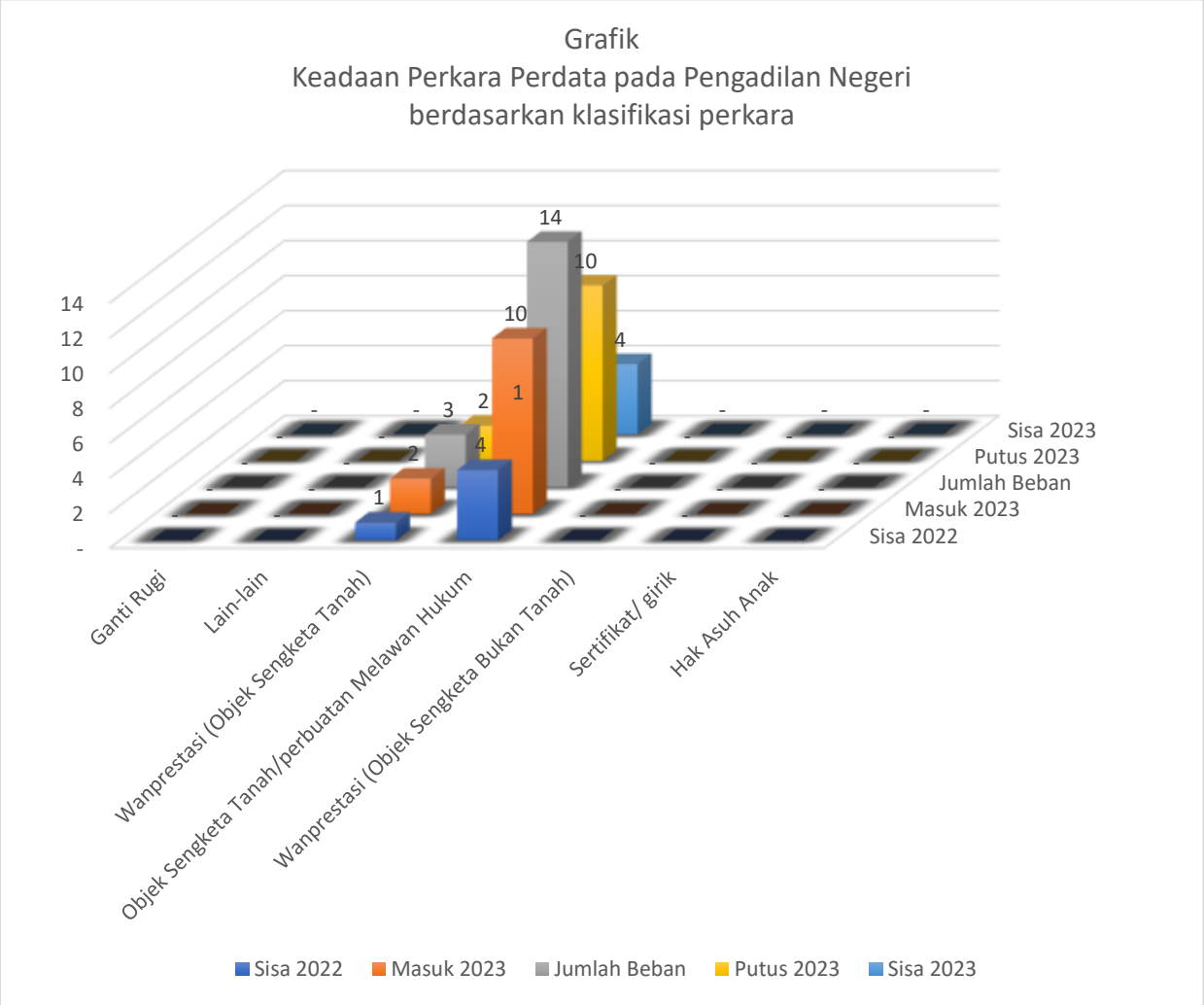

Grafik Perkara Pidana Biasa
2
2
1
1
-
2 2
2 2
2 2
Sisa 2022
Masuk 2023
Jumlah Beban
Putus 2023
Sisa 2023
Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
Lain-lain

Keadaan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Parigi berdasarkan Klasifikasi Perkara

No	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa 2023
1	Jual Beli Tanah	-	-	-	-	-
2	Jual Beli	-	-	-	-	-
3	Warisan/wasiat	-	1	1	-	1
4	Perceraian	2	70	72	65	7
5	Harta Bersama	-	-	-	-	-
6	Perbuatan Melawan Hukum	4	15	19	10	9
7	Ganti Rugi	-	-	-	-	-
8	Lain-lain	-	-	-	-	-
9	Wanprestasi (Objek Sengketa Tanah)	1	2	3	2	1
10	Objek Sengketa Tanah/perbuatan Melawan Hukum	4	10	14	10	4
11	Wanprestasi (Objek Sengketa Bukan Tanah)	-	-	-	-	-
12	Sertifikat/ girik	-	-	-	-	-
13	Hak Asuh Anak	-	-	-	-	-
	Jumlah	**11**	**98**	**109**	**87**	**22**

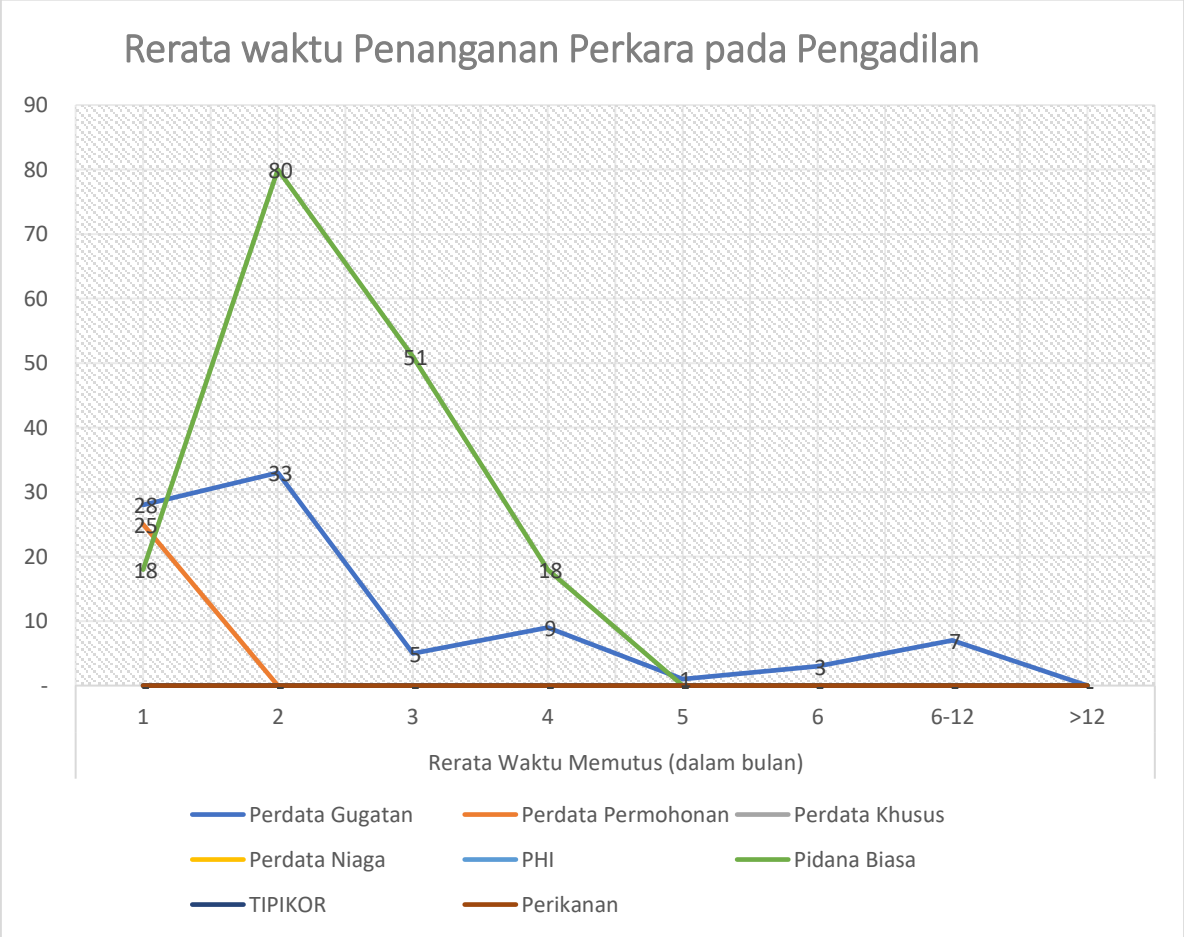
Grafik
Keadaan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri berdasarkan klasifikasi perkara




Grafik
Keadaan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri
berdasarkan klasifikasi perkara
14
12
10
8
6
4
2
-
Ganti Rugi
Lain-lain
Wanprestasi (Objek Sengketa Tanah)
Objek Sengketa Tanah/perbuatan Melawan Hukum
Wanprestasi (Objek Sengketa Bukan Tanah)
Sertifikat/ girik
Hak Asuh Anak
Sisa 2022
Masuk 2023
Jumlah Beban
Putus 2023
Sisa 2023

Rerata waktu Penanganan Perkara pada Pengadilan Negeri Parigi

No	Jenis Perkara	Rerata Waktu Memutus (dalam bulan)							
		1	2	3	4	5	6	6-12	>12
1	Perdata Gugatan	28	33	5	9	1	3	7	-
2	Perdata Permohonan	25	-	-	-	-	-	-	-
3	Perdata Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Perdata Niaga	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PHI	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pidana Biasa	18	80	51	18	-	-	-	-
7	TIPIKOR	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-



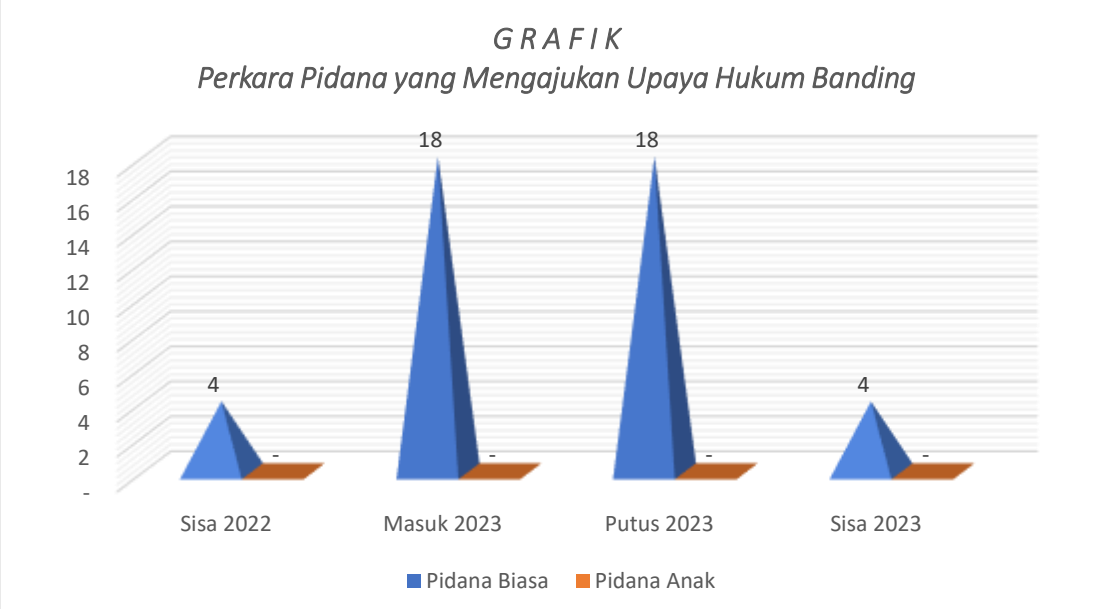
2. Keadaan Perkara Tingkat Tingkat Banding

Laporan Perkara Tingkat Banding adalah merupakan laporan Perkara yang dimohonkan banding, dan dilaporkan sejak perkara putus, diajukannya permohonan Banding sampai dengan pengirima berkas ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

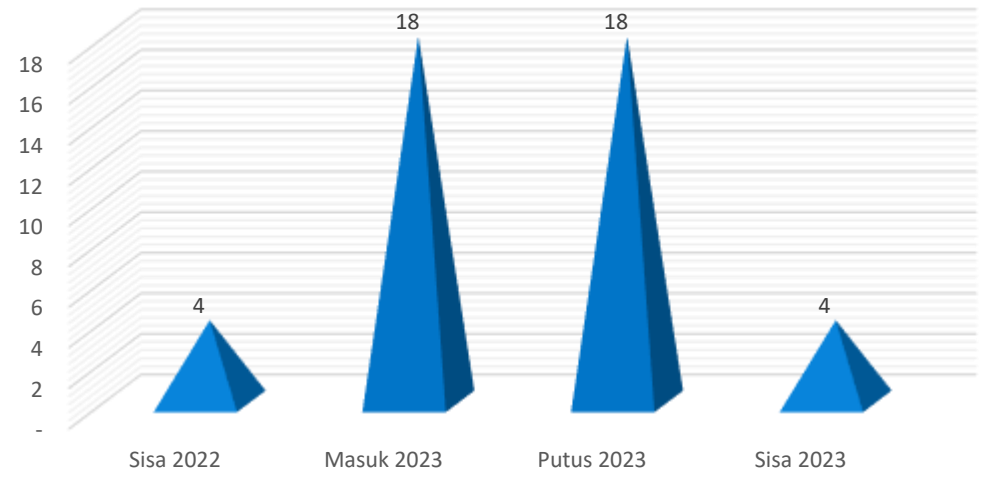
Keadaan Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2022	Perkara Banding Tahun 2023	Putus Tahun 2023	Sisa Tahun 2023
	PIDANA				
1	Pidana Biasa	4	18	18	4
2	Pidana Anak	-	-	-	-
	Total Pidana	4	18	18	4
	PERDATA				
1	Gugatan	2	16	16	2
	Total Perdata	2	16	16	2
	Jumlah Perkara Pidana dan Perdata	6	34	34	6

.



Grafik
Perkara Perdata yang Mengajukan Upaya Hukum Banding



3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Jika pihak berperkara (yang dikalahkan atau dimenangkan) berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang disampaikan kepadanya tidak memenuhi rasa keadilan atau ada kesalahan dalam menerapkan hukum, maka pencari keadilan dapat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung R.I melalui Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam tanggal waktu 14 (empat belas) Hari setelah pemberitahuan isi Banding diterima.

Keadaan Perkara yang mengajukan upaya Hukum Kasasi

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2022	Perkara Kasasi Tahun 2023	Putus Tahun 2023	Sisa Tahun 2023
	PIDANA				
1	Pidana Biasa	5	6	9	2
2	Pidana Anak	-	-	-	-
	Total Pidana	5	6	9	2
	PERDATA				
1	Gugatan	4	6	4	6
	Total Perdata	4	6	4	6
	Jumlah Perkara Pidana dan Perdata	9	12	13	8

GRAFIK
KEADAAN PERKARA PIDANA YANG MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI



.

GRAFIK *KEADAAN PERKARA PERDATA YANG MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI*



4. Keadaan Perkara Peninjauan Kembali (PK)

Permohonan pinjauan kembali dapat diajukan dalam waktu 180 hari kalender, dalam hal :

a. Apabila putusan didasarkan pada suaru kebohongan atau tipu muslihat lwan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim Pidana dinyatakan palsu, adalah sejak diketahui kebohongnan atau pitu muslihat atau sejak putusan Hakim Pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan tetap diberitahukan kepada pihak yang berperkara.
b. Apabila setelah pekara diputuskan surat-surat bukti yang sisifat menentukan yang ada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, adalah sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukanya harus dinyatakan dibawah sumpah dan sahkan oleh pejabat yang berwenang.
c. Apabila setelah dikabukan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebannya, dan apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentang satu dengan yang lain, adalah sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberikan kepada para pihak yang berperkara.
d. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, adalah sejak putusan yang akhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah di beritahukan kepada pihak yang berperkara.

Keadaan Perkara Tingkat Peninjaun Kembali

No	Jenis Perkara	PN Parigi
1	Pidana Biasa	-
2	Pidana Anak	-
3.	Perdata	-

B. PENYELESAIAN PERKARA

B1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus 2023

Jumlah sisa perkara yang diputus merupakan sisa pekara yang belum diselesaikan pada tahun 2022 dan kemudian diputuskan di tahun 2023.

Jumah Sisa Perkara Yang diputus Tahun 2023

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2022	Putus pada Tahun 2023	%
1	Gugatan	11	87	790,91
2	Permohonan	-	25	25
3	Gugatan Sederhana	1	2	200
4	Pidana Biasa	26	181	153,85
5	Pidana Cepat	-	2	2
6	Perkara Lalu-Lintas	-	1423	1423
7	Pidana Anak	-	1	1
8	Pidana Praperadilan	-	1	1

Keterangan :

- Sisa Perkara Gugatan Tahun 2022 yang diputus Tahun 2023 : **87** Perkara;
- Sisa Gugatan Sederhana Tahun 2022 yang diputus Tahun 2023 : **2** Perkara;
- Sisa Pidana Biasa Tahun 2022 yang diputus Tahun 2023 : **40** Perkara;

B2. Jumlah Sisa Perkara yang diputus tepat waktu

Jumlah pekara yang diputus dan disajikan adalah pekara yang masuk, diputus dan diselesaikan di Tahun 2023.

No	Jenis Perkara	Perkara Masuk	Yang Diputus Tepat Waktu	%
1	Gugatan	98	87	88,78
2	Permohonan	25	25	100
3	Gugatan Sederhana	1	2	100
4	Pidana Biasa	195	181	92,82
5	Pidana Cepat	2	2	100
6	Perkara Lalu-Lintas	1423	1423	100
7	Pidana Anak	1	1	100
8	Pidana Praperadilan	1	1	100

Keterangan :

- Sisa Perkara Gugatan yang putus tepat waktu : **87** Perkara;
- Sisa Perkara Permohonan yang putus tepat waktu : **25** Perkara;
- Sisa Perkara Gugatan Sederhana yang putus tepat waktu : **2** Perkara;
- Sisa Perkara Pidana Biasa yang putus tepat waktu : **181** Perkara;
- Sisa Perkara Pidana Cepat yang putus tepat waktu : **2** Perkara;
- Sisa Perkara Perkara Lalu-Lintas yang putus tepat waktu : **1** Perkara;
- Sisa Perkara Pidana Anak yang putus tepat waktu : **1** Perkara;
- Sisa Perkara Pidana Praperadilan yang putus tepat waktu : **1** Perkara;

B3. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

No	Jenis Perkara	Putus PN	Tidak Banding	Putus Banding	Tidak Kasasi	Putus Kasasi	Tidak PK
1	Gugatan	87	71	16	10	5	1
2	Pidana Biasa	181	163	18	167	9	---
3	Pidana Anak	1	-	1	-	-	-

B4. Jumlah Perkara Perdata yang berhasil dimediasi

No	Satuan Kerja	Perkara Mediasi	Berhasil Mediasi	Gagal Mediasi
1.	PN Parigi	98	-	98

Keterangan :

- Perkara Perdata Gugatan yang Masuk Mediasi Tahun 2023 : **98** Perkara;
- Berhasil Mediasi : **-** Perkara;
- Gagal Mediasi : **98** Perkara;

B5. Jumlah Perkara anak yang berhasil melalui Diversi

No	Satuan Kerja	Jumlah Perkara Anak	Melalui Diversi	Gagal Diversi
1.	PN Parigi	1	-	1

Keterangan :

- Perkara Anak yang berhasil melalui Diversi Tahun 2023 berjumlah : - Perkara;

C. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

C.1. POSBAKUM

Dasar Hukum adanya kerjasama Pengadilan Negeri Parigi dengan Satker Posbakum yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/2M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Predosur (SOP). Administrasi Pemerintah, Operasional Presedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/1/2012 setantang Standar Pelayanan Peradilan, Buku I dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/Tahun 2014 tentang Petunjukan Pelaksanaan Perma RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bagi MasYarakat tidak mampu di Pengadilan, Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretarariatan.

Berikut Posbakum yang bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Parigi

1. Yayasan Rumha Hukum Tadulako
2. Lembaga Bantuan Hukum (PBH) Kanoana

Pengadilan Negeri Parigi telah melaksanakan Posbakum dalam Program Peningkatan Managemn Peradilan Umum Nomor DIPA SP DIPA-005-03.2.672981/2024 mendapat Pagu Anggaran dengan anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp.19.200.000 yang diperutukan untuk Pegacara Piket dan target Volume output sebesar 81 Orang layanan. Dari anggaran tersebut, sampai dengan akhir tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp.19.200.000 (100%) dengan capaian volume output sebesar 81 Orang layanan.

Jumlah Pelayanan Posbakum Tahun 2023

Kegiatan	Tahun 2023 Bulan												Total
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop.	Des.	
Layanan Posbakum	-	19	-	11	10	16	2	12	-	2	9	-	81



Gambar Ruang Pos Bakum PN Parigi

C.2. SIDANG KELILING

Sidang Keliling merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri kepada masyarakat. Tujuan dilakukan sidang keliling adalah untuk menjangkau masyarakat pencari keadilan yang bertempat tinggal jauh dari Pengadilan Negeri sehingga dapat menghemat biaya dan menghemat waktu agar tercipta peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Sidang Keliling Pidana Tahun 2023

Kegiatan	Tahun 2023 B u l a n												Total
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop.	Des.	
Sidang Keliling Pidana	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	26	2	30

Sidang Keliling Perdata Tahun 2023

Kegiatan	Tahun 2023 Bulan												Total
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop.	Des.	
Sidang Keliling Perdata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pengadilan Negeri Parigi telah melaksanakan Sidang Keliling dalam Program Peningkatan Managemn Peradilan Umum Nomor DIPA-005-03.2.672981/2023 mendapat Pagu Anggaran dengan anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp.20.000.000 yang diperutukan untuk Pegacara Piket dan target Volume output sebesar 30 Perkara layanan. Dari anggaran tersebut, sampai dengan akhir tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp.19.980.000 (99,90%) dengan capaian volume output sebesa 30 Perkara layanan.

D. PERKARA PRODEO (Pembebasan Biaya Perkara)

Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan, dimana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014. Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Parigi tidak mendapatkan alokasi anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor DIPA-005-03.2.672981/2023 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang diperuntukkan untuk menyediakan pemberian layanan pembebasan biaya perkara bagi perkara yang diajukan secara prodeo. Berdasarkan Register Perkara Perdata Tahun 2023, tercatat tidak ada perkara-perkara perdata yang diajukan secara prodeo di Pengadilan Negeri Parigi.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023



BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA

PENGADILAN NEGERI PARIGI

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia adalah salah satu faktor yang paling penting dan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik instansi maupun perusahaan. SDM merupakan penentu perkembangan perusahaan. Pada hakekatnya, Sumber Daya Manusia (SDM) berupa manusia yang dipekerjakan dalam sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuannya. Ditahun 2023 Pengadilan Negeri Parigi memiliki jumlah Sumber Daya Manusia yang berjumlah 29 Pegawai dengan klarifikasi sebagai berikut :

KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN /GOLONGAN/PENDIDIKAN

Pengadilan Negeri Parigi memiliki Sumber Daya Manusia yang berjumlah 29 pegawai yang belum terdaftar diaplikasi SIKEP 0 (Nol) orang, pegawai yang mutasi pindah sebanyak 4 orang dan mutasi masuk sebanyak 2 orang sehingga jumlah yang ada saat ini berjumlah 27 Orang.

No	Jabatan	Jumlah SDM
1	Ketua	1
2	Wakil Ketua	-
3	Hakim	6
4	Panitera	1
5	Panitera Muda Perdata	1
6	Panitera Muda Pidana	1
7	Panitera Muda Hukum	1
8	Panitera Pengganti	3
9	Sekretaris	1
10	Kasubag Umum dan Keuangan	1
11	Kasubag Perencanaa, Teknologi Informasi dan Pelaporan	1
12	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	1
13	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1
14	Pranata Komputer	1
15	Jurusita	1
16	Jurusita Pengganti	1
17	Arsiparis Pelaksana	1
18	Analis Perkara Peradilan	3
19	Pengelola Perkara	2
	JUMLAH	**27**

a. Komposisi Sumber Daya Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

Jenis Pangkat	Golongan	Jumlah	Persentase
IV/b	Pembina Tk.I	-	-
IV/a	Pembina	1	3,70
III/d	Penata Tk.I	7	25,93
III/c	Penata	2	7.41
III/b	Penata Muda Tk. I	9	33,33
III/a	Penata Muda	4	14,81
II/d	Pengatur Tk. I	-	-
II/c	Pengatur	3	11,11
II/b	Pengatur Muda Tk. I	-	-
II/a	Pengatur Muda	-	-
	JUMLAH	**27**	**100**

b. Komposisi Sumber Daya Berdasarkan Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
Strata III (S3)	-	-
Strata II (S2)	2	7,41
Strata II (S1)	21	77,78
Diploma III (3)	4	14,81
III/b	-	
III/a	-	
II/d	-	
II/c	-	
II/b	-	
II/a	-	
JUMLAH	**27**	**100**

Berikut ini data-data Kenaikan Pangkat seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Parigi pada tahun 2023 :

Kenaikan Pangkat Periode April 2023

Pimpinan	Hakim	Kepaniteraan	Kejurusitaan	Sekretaris	Kasubag	Pelaksana
-	-	-	-	-	-	-

Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2023

Pimpinan	Hakim	Kepaniteraan	Kejurusitaan	Sekretaris	Kasubag	Pelaksana
-	-	1	-	-	-	-

Jabatan Kosong

Pimpinan	Hakim	Kepaniteraan	Kejurusitaan	Sekretaris	Kasubag	Pelaksana
1	-	-	-	-	-	-

Pengangkatan CAKIM /CPNS Baru Tahun 2023

Selama 2023, Pengadilan Negeri Parigi mengalami penambahan tidak ada orang CPNS sedangkan penambahan Cakim 3 (Tiga).

A. MUTASI

Tabel Mutasi Tahun 2023

No.	Keterangan	Masuk	Keluar	Pensiun
1	Pimpinan	-	-	-
2.	Hakim	-	-	-
3.	Kepaniteraan	1	2	-
4.	Kejurusitaam	-	-	-
5.	Kesekretariatan	1	2	-

Adapun Rincian Data Pegawai Mutasi Masuk dan Keluar berdasarkan Jabatan Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel Mutasi Masuk Berdasarkan Jabatan

No	Nama/NIP Pangkat	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Talha, S.Kom 19801012 201101 2004 Penata Tk. I (III/d)	Kasub Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Buol	Kasub PTIP Pengadilan Negeri Parigi
2	Rahmawati, S.H. 19710430 199703 2 004	Panitera Muda Khusus Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Palu	Panitera Pengadilan Negeri Parigi

Tabel Mutasi Keluar Berdasarkan Jabatan

No	Nama/NIP Pangkat	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Visuddhatma Sankara, S.Kom 19801012 201101 2004 Penata Tk. I (III/d)	Pranata Komputer	Pranata Komputer Ahli Pratama
2	Abdul Muin, S.Kom. 19811021 200912 1 002 Penata Tk. I (III/d)	Kasub PTIP Pengadilan Negeri Parigi	Kasub Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Luwuk
3	I Ketut Sueca, SH. 19690706 199203 1 002 Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengadilan Negeri Parigi	Panitera Pengadilan Negeri Situbondo Klas IB
4	Muhammad Taslim Thahir, S.H. 19670812 198803 1 002 Penata Tk. I (III/d)	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Parigi	Panitera Pengganti PT Sulteng

B. PROMOSI

Yang dimaksud dengan promosi jabatan adalah mutasi dengan kenaikan jabatan, baik dari dalam Pengadilan Negeri Parigi maupun keluar Pengadilan Negeri Parigi.

No	Nama/NIP Pangkat	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Muhammad Mu`amar, S.Psi 19880919 201903 1 008 Penata Muda Tk. I (III/b)	Analis Tatalaksana	Kasub Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Parigi

Demosi Jabatan

Yang dimaksud Demosi Jabatan adalah Mutasi dengan penurunan jabatan, baik dari luar Pengadilan Negeri Parigi maupun keluar Pengadilan Negeri Parigi.

---Nihil---

Promosi Pangkat Reguler

No	Nama	Jabatan	Pangkat Lama	Pangkat Baru
1	NI MD Sudiarjani, SH	Panitera Pengganti	Penata Muda (III/a)	Penata Muda Tk. I (III/b)

C. PENSIUN

Pada Tahun 2023 di Pengadilan Negeri Tilamuta tidak terdapat pegawai yang memasuki masa Pensiun/Purna Bhakti.

D. DIKLAT (SDM Teknis /Non Teknik yang yang telah mengikuti Diklat)

No	Nama	Jabatan	Nama Diklat
1	Riwandi, SH	Hakim	Diklat Perkara Gugatan Ssederhana (Small Claim Court)
2	Iin Fatimah, SH., MH.	Hakim	Diklat Hakim: Restorative Justice 2023
3	Venty Pratiwi, S.H.	Hakim	- Pelatihan Hakim Berkelanjutan 1/ Continuing Justice Education (CJE 1) Bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia; - Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif
4	Indorenung, S.T., S.H.	Sekretaris	bimtek kepegawaian sewilayah hukum sulteng
5	Fenny Kalyana Cendana, SE	Kasub Umum dan Keuangan	Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
6	Riya Wahyuningtyas, SH	Kasub Kepegawaian dan Ortal	bimtek kepegawaian sewilayah hukum sulteng
7	Bheli Isya Kurniawan Koloay, ST	Pranata Komputer	Bimtek Kepegawaian
8	Lina Oktavia, A.Md. A.P.	Arsipasri Trampil	E-Learning Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023



BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

PENGADILAN NEGERI PARIGI

A. PENGELOLA KEUANGAN

Anggaran Pengadilan Negeri Parigi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yaitu :

- DIPA 01 Badan Urusan Administrasi (BUA)
- DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (BADILUM).

Komposisi penggunaan anggaran pada masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Parigi Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya

Program ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.936.279.000 (*empat milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*). Rincian kegiatan yang dilaksanakan beserta realisasi penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	4,936,279,000	0	4,153,970,892	627,349,003	4,781,319,895	96.86 %	154,959,105
WA Program Dukungan Manajemen	4,936,279,000	0	4,153,970,892	627,349,003	4,781,319,895	96.86 %	154,959,105
WA.1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	4,582,995,000	0	4,094,120,892	315,460,003	4,409,580,895	96.24 %	153,114,105
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,582,995,000	0	4,094,120,892	315,460,003	4,409,580,895	96.24 %	153,114,105
EBA.962 Layanan Umum	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	100.00	0
051 Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Sewaan	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	100.00	0
051.0A INVENTARIS PERKANTORAN CPNS	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	100.00	0
521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Elektrakomptabel	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	100.00	0
EBA.994 Layanan Perkantoran	4,353,995,000	0	4,085,120,892	315,460,003	4,400,580,895	96.64 %	153,114,105
001 Gaji dan Tunjangan	3,113,906,000	0	2,739,897,760	224,437,039	2,964,334,799	95.20 %	149,571,201
001.0A Pembayaran gaji dan tunjangan	3,113,906,000	0	2,739,897,760	224,437,039	2,964,334,799	95.20 %	149,571,201
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	1,317,036,000	0	1,157,680,080	85,683,300	1,243,363,380	94.41 %	73,672,620
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	24,000	0	20,687	1,524	22,211	92.55 %	1,789
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	81,085,000	0	72,832,260	5,166,610	78,030,870	96.23 %	3,054,130
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	21,972,000	0	19,741,368	1,445,060	21,186,428	96.42 %	785,572
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	25,740,000	0	23,680,000	1,030,000	24,710,000	96.00 %	1,030,000
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,125,295,000	0	999,195,000	77,075,000	1,076,270,000	95.64 %	49,025,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	107,004,000	0	101,693,745	3,734,505	105,428,250	98.53 %	1,575,750
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	69,740,000	0	62,353,620	4,490,540	66,843,660	95.85 %	2,896,340
511129 Belanja Uang Makan PNS	226,845,000	0	184,451,000	35,229,000	219,680,000	96.84 %	7,165,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	16,315,000	0	14,300,000	1,100,000	15,400,000	94.39 %	915,000
511157 Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	122,650,000	0	103,950,000	9,450,000	113,400,000	92.51 %	9,450,000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,439,789,000	0	1,345,221,132	91,022,964	1,436,244,096	99.75 %	3,544,904
002.0A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	310,548,000	0	268,818,496	39,989,150	308,807,646	99.38 %	1,940,354
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	251,701,000	0	214,438,896	35,320,850	249,760,746	99.23 %	1,940,254
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	58,847,000	0	54,178,800	4,668,200	58,847,000	100.00	0
002.0B LANGGANAN DAYA DAN JASA	255,747,000	0	252,412,943	3,063,480	255,476,423	99.89 %	270,577
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	223,988,000	0	221,893,298	2,017,675	223,910,973	99.97 %	77,027
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6,680,000	0	5,804,200	814,700	6,618,900	97.28 %	181,100
522111 Belanja Langganan Listrik	21,011,000	0	21,011,000	0	21,011,000	100.00	0
522112 Belanja Langganan Telepon	2,652,000	0	2,408,847	231,105	2,640,952	99.55 %	11,048
522141 Belanja Sewa	1,496,000	0	1,495,500	0	1,495,500	99.97 %	500
002.0C PEMELIHARAAN KANTOR	528,452,000	0	488,797,394	39,845,000	528,432,394	100.00	19,606
521111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	315,993,000	0	312,092,980	3,900,000	315,992,980	100.00	20
521121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	212,459,000	0	186,694,414	25,745,000	212,439,414	99.99 %	19,586
002.0D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR	91,484,000	0	81,980,000	8,772,000	90,332,000	98.74 %	1,152,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	36,200,000	0	36,200,000	0	36,200,000	100.00	0
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	55,284,000	0	45,780,000	8,772,000	54,132,000	97.92 %	1,152,000
002.0E PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN	3,021,000	0	3,020,000	0	3,020,000	99.97 %	1,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	2,021,000	0	2,020,000	0	2,020,000	99.95 %	1,000
522191 Belanja Jasa Lainnya	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100.00	0
002.0F RAPAT KOORDINASI INTERNAL	11,855,000	0	11,855,000	0	11,855,000	100.00	0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	11,855,000	0	11,855,000	0	11,855,000	100.00	0
002.0G KOORDINASI KE TINGKAT BANDING/MAHKAMAH AGUNG RI	76,602,000	0	75,079,633	1,370,000	76,449,633	99.80 %	152,367
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	76,602,000	0	75,079,633	1,370,000	76,449,633	99.80 %	152,367
002.0H KONSUL TASI KE KPPN/KANWIL/KPKNL	39,825,000	0	36,145,866	3,773,334	39,919,000	100.00	1,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	39,825,000	0	36,145,866	3,773,334	39,919,000	100.00	1,000
002.0I PENANGANAN COVID-19	12,000,000	0	7,584,000	4,410,000	11,994,000	99.95 %	6,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	12,000,000	0	7,584,000	4,410,000	11,994,000	99.95 %	6,000
002.0J HAK DAN FASILITAS KEUANGAN HAKIM DAN HAKIM AD HOC	110,160,000	0	110,160,000	0	110,160,000	100.00	0
522141 Belanja Sewa	110,160,000	0	110,160,000	0	110,160,000	100.00	0

WA.1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	373,584,000	0	59,650,000	311,889,000	371,739,000	99.51 %	1,845,000
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	373,584,000	0	59,650,000	311,889,000	371,739,000	99.51 %	1,845,000
EBB.951 Layanan Sarana Internal	324,377,000	0	59,650,000	262,682,000	322,532,000	99.43 %	1,845,000
053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	324,377,000	0	59,650,000	262,682,000	322,532,000	99.43 %	1,845,000
053.0A FASILITAS PERKANTORAN	324,377,000	0	59,650,000	262,682,000	322,532,000	99.43 %	1,845,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	324,377,000	0	59,650,000	262,682,000	322,532,000	99.43 %	1,845,000
EBB.971 Layanan Prasarana Internal	49,207,000	0	0	49,207,000	49,207,000	100.00	0
051 Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	49,207,000	0	0	49,207,000	49,207,000	100.00	0
051.0A Tambah Daya dan Perbaikan Jaringan	49,207,000	0	0	49,207,000	49,207,000	100.00	0
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	49,207,000	0	0	49,207,000	49,207,000	100.00	0

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 99.900.000 (*Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*). Rincian kegiatan yang dilaksanakan beserta realisasi penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	99,900,000	0	82,530,700	16,673,000	99,203,700	99.30 %	696,300
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	99,900,000	0	82,530,700	16,673,000	99,203,700	99.30 %	696,300
BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	99,900,000	0	82,530,700	16,673,000	99,203,700	99.30 %	696,300
AEA Koordinasi	1,500,000	0	750,000	750,000	1,500,000	100.00	0
AEA.001 Persiapan Penyelesaian Perkara	1,500,000	0	750,000	750,000	1,500,000	100.00	0
052 Dukungan Penyelesaian Perkara	1,500,000	0	750,000	750,000	1,500,000	100.00	0
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	1,500,000	0	750,000	750,000	1,500,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,500,000	0	750,000	750,000	1,500,000	100.00	0
BCA Perkara Hukum Perseorangan	59,200,000	0	53,590,700	4,933,000	58,523,700	98.86 %	676,300
BCA.U08 Perkara Pidana yang Diselesaikan Oleh/pada Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Tengah	59,200,000	0	53,590,700	4,933,000	58,523,700	98.86 %	676,300
051 Pendaftaran Berkas Perkara	16,420,000	0	14,785,000	1,635,000	16,420,000	100.00	0
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	16,420,000	0	14,785,000	1,635,000	16,420,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	4,800,000	0	3,780,000	1,020,000	4,800,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	11,620,000	0	11,005,000	615,000	11,620,000	100.00	0
052 Penetapan Hari Sidang	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000	100.00	0
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000	100.00	0
053 Pengiriman surat pemanggilan dan pemberitahuan putusan	12,500,000	0	12,295,000	205,000	12,500,000	100.00	0
053.0A TANPA SUB KOMPONEN	12,500,000	0	12,295,000	205,000	12,500,000	100.00	0
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,000,000	0	1,795,000	205,000	2,000,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,500,000	0	10,500,000	0	10,500,000	100.00	0
054 Pemeriksaan di tempat pengadilan	7,900,000	0	6,880,000	1,020,000	7,900,000	100.00	0
054.0A TANPA SUB KOMPONEN	7,900,000	0	6,880,000	1,020,000	7,900,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	7,900,000	0	6,880,000	1,020,000	7,900,000	100.00	0
055 Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa	9,850,000	0	9,536,000	314,000	9,850,000	100.00	0
055.0A TANPA SUB KOMPONEN	9,850,000	0	9,536,000	314,000	9,850,000	100.00	0
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,950,000	0	1,636,000	314,000	1,950,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,900,000	0	7,900,000	0	7,900,000	100.00	0
056 Minutasi/Kajsus hukum	2,800,000	0	1,910,000	760,000	2,670,000	95.36 %	130,000
056.0A TANPA SUB KOMPONEN	2,800,000	0	1,910,000	760,000	2,670,000	95.36 %	130,000
521211 Belanja Bahan	2,800,000	0	1,910,000	760,000	2,670,000	95.36 %	130,000
057 Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat pertama	2,130,000	0	1,206,000	672,000	1,878,000	88.17 %	252,000
057.0A TANPA SUB KOMPONEN	2,130,000	0	1,206,000	672,000	1,878,000	88.17 %	252,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	630,000	0	98,000	422,000	478,000	75.87 %	152,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,500,000	0	1,160,000	250,000	1,400,000	93.33 %	100,000
058 Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	2,100,000	0	1,478,700	327,000	1,805,700	85.99 %	294,300
058.0A TANPA SUB KOMPONEN	2,100,000	0	1,478,700	327,000	1,805,700	85.99 %	294,300
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,000,000	0	678,700	227,000	905,700	90.57 %	94,300
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,100,000	0	800,000	100,000	900,000	81.82 %	200,000
QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	19,200,000	0	17,400,000	1,800,000	19,200,000	100.00	0
QBA.002 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	19,200,000	0	17,400,000	1,800,000	19,200,000	100.00	0
051 Pos Bantuan Hukum	19,200,000	0	17,400,000	1,800,000	19,200,000	100.00	0
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	19,200,000	0	17,400,000	1,800,000	19,200,000	100.00	0
522131 Belanja Jasa Konsultan	19,200,000	0	17,400,000	1,800,000	19,200,000	100.00	0
QCA Perkara Hukum Perseorangan	20,000,000	0	8,790,000	11,190,000	19,980,000	99.90 %	20,000
QCA.002 Sidang di luar Gedung Pengadilan	20,000,000	0	8,790,000	11,190,000	19,980,000	99.90 %	20,000
051 Sidang di luar Gedung Pengadilan	20,000,000	0	8,790,000	11,190,000	19,980,000	99.90 %	20,000
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	20,000,000	0	8,790,000	11,190,000	19,980,000	99.90 %	20,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20,000,000	0	8,790,000	11,190,000	19,980,000	99.90 %	20,000

Rincian penyerapan anggaran per program pada DIPA Pengadilan Negeri Parigi Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Realisasi Anggaran Per Program 2023

No.	DIPA	PAGU	Realisasi	%
1.	DIPA 01 Badan Urusan Administrasi (BUA)	4.936.279.000	4.781.319.895	96.86
2.	Dipa 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum)	99.900.000	99.203.700	99.30

B. PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA

1. Tanah

Pengadilan Negeri Parigi memiliki aset tanah yang digunakan untuk Gedung Kantor, Bangunan Rumah Negara/Dinas dan Mess yang diperuntukan untuk para Hakim, Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pengadilan Negeri Parigi. Tanah yang di kelola dan tercatat dalam laporan Barang Milik Negara (BMN) per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Lokasi Tanah	Keterangan	Luas Tanah (M2)
1	Bambalemo	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	7,682
2	Bambalemo	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	6,262
3	Moutong Timur	Tempat Sidang/Zitting Plaat	1,780

2. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan yang menjadi aset dan tercatat dalam laporan Barang Milik Negara (BMN) Pengadilan Negeri Parigi per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Lokasi Tanah	Nama Gedung/Bangunan	Jumlah (Unit)
1	Bambalemo	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1
2	Kampal	Bangunan Mess	1
3	Moutong Timur	Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaats	1



Gambar Gedung Kantor Pengadilan Negeri Parigi (Bambalemo)

3. Kendaraan Dinas

Kendaraan Dinas yang di kelola dan tercatat dalam laporan Barang Milik Negara (BMN) Pengadilan Negeri Parigi per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi	Keterangan
1	Minibus	Pinjam Pakai	-	Baik	Jabatan Ketua
2	Minibus	Pinjam Pakai	-	Baik	Jabatan Wakil Ketua
3	Minibus	Kijang Inova	2011	Baik	Jabatan Penitera
4	Minibus	Toyota New Rush	2022	Baik	Jabatan Sekretaris
5	Minibus	New Avanza	2015	Baik	Operasional Umum dan Keuangan
6	Sepeda Motor	Verza	2015	Baik	Operasional Kepaniteraan
7	Sepeda Motor	Supra X 125 R	2010	Baik	Operasional Umum dan Keuangan

4. Rumah Dinas

Aset Rumah Dinas Pengadilan Negeri Parigi Belum ada. Sudah dalam pengusulan anggaran tahun 2025.

5. Sarana/Prasarana Gedung

Sarana Prasarana Gedung Pengadilan Negeri Parigi per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Kondisi
1.	Ruang Ketua	1	Baik
2.	Ruang Wakil	1	Baik
3.	Ruang Hakim	1	Baik
4.	Ruang Panitera	1	Baik
5.	Ruang Sekretaris	1	Baik
6.	Ruang Panitera Muda	3	Baik
7.	Ruang Kepala Sub Bagian	3	Baik
8.	Ruang Panitera Pengganti	1	Baik
9.	Ruang Jurusita/Jurusita Pengganti	1	Baik
10.	Ruang Sidang	3	Baik
11.	Ruang Mediasi/Diversi	1	Baik
12.	Ruang Rapat	1	Baik
13.	Ruang Tunggu Pengunjung/R, Tamu Terbuka	2	Baik
14.	Ruang Tunggu Pengacara/ Posbakum	1	Baik
15.	Ruang Tunggu Jaksa	1	Baik
16.	Ruang Tunggu Ramah Anak	1	Baik
17.	Ruang Laktasi/Kesehatan	1	Baik
18.	Ruang Perpustakaan	1	Baik
19.	Ruang Tahanan	2	Baik
20.	Ruang Arsip Perkara	2	Baik
21.	Ruang Barang Bukti	1	Baik
22.	Ruang Gudang	3	Baik
23.	Ruang Server	1	Baik
24.	Ruang Musholla	1	Baik
25.	Meja Informasi/Pelayanan Terpadu	1	Baik
26.	Toilet Pegawai	1	Baik
27.	Toilet Pengunjung	2	Baik
28.	Toilet Difabel	2	Baik

5. Sarana/Prasarana Gedung

Sarana Prasarana Gedung Pengadilan Negeri Parigi per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Sarana/Prasarana/Fasilitasas Perkantoran	Jumlah	Keterangan
1	Komputer/PC.Unit	27	BMN
2	Laptop	21	BMN
3	AC	23	BMN
4	Televisi Monitor	2	BMN
5	Sound System	8	BMN
6	Scanner	4	BMN
7	Mesin Absensi	1	BMN
8	Server	2	BMN
9	Router	1	BMN
10	Generator Set	1	BMN

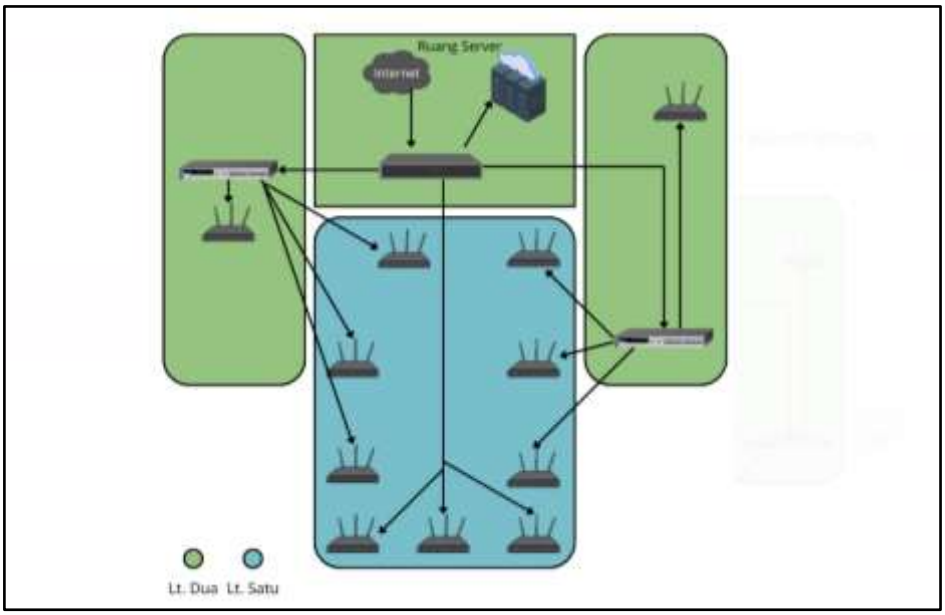
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana melalui Belanja Modal pada DIPA-01 Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Kipas Angin Uap	2	Selesai
2	Sumur Pemboran Air	1	Selesai
3	AC Standing	5	Selesai

C. PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Untuk terwujdunya badan peradilan yang agung berbasis teknologi dan keterbukaan, Pengadilan Negeri Aprigi masih terus berinovasi dalam Inovasi (TI), selain untuk meningkatkan dalam hal pekerjaan untuk mencapai hasil yang maksimal, efisiensi dan efektifitas dan juga untuk terpenuhinya kebutuhna para pencari keadilan dengan cepat, transpparan, akuntabel dan adil. Hal ini diperkuat dengan adanya sarana dan prasarana mulai dari perangkat lunas seperti :

a. Perangkta Lunak : website Pengadilan Negeri Parigi, Sistem Penelusuran Perkara (SIPP), Direktori Putusan, SIKEP, MIS, , e- Court, e-Raterang, KOMDANAS, Aplikasi Ajungan Mandiri, Aplikasi Antrian Online, SIMPONI dan SIMARI (Aplikasi yang behubungan dengan PNBP), SAKIP, SIANS dan e-Kinerja (Aplikasi yang berhubungan dengan Kepegawaian), SAKTI, SMARTDJ, e-BAPPENAS PP-39 (Aplikasi dengan Kinerja Keuangan) dan Aplikasi Lainnya.
b. Perangkat Keras : CCTV,LCD /Proyektor/Infocus, Scanner/Layar LCD Proyektor. Televisi, UPS. Personil Computer/PC. Laptop, Printer, Scanner, Router (Mikrotik) dan lain-lain.



Gambar Topologi Jaringan PN Parigi

1. Implementasi e-Court di Lingkungan Peradilan Umum

Aplikasi e-Court merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA tersebut merupakan penyempurnaan dari PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 adalah sebuah inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*Justice reform*) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (IT for Judiciary). Peraturan Mahkamah Agung RI yang ditetapkan pada Bulan Agustus 2019 tersebut sangat relevan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki issue utama dalam *access tojustice*. Hal ini menjadi tonggak awal dalam revolusi administrasi perkara dan persidangan di pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ini juga merupakan pondasi dari implementasi aplikasi e-court di dunia peradilan Indonesia, sehingga proses pendaftaran, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan dan persidangan sudah dilaksanakan secara elektronik, tidak manual lagi. Secara substansial, Peraturan Mahkamah Agung tersebut tidak menghapus ataupun menganulir norma hukum acara perdata yang berlaku, melainkan menambah ataupun menyempurnakannya.

e-Court telah diimplementasikan di Pengadilan Negeri Parigi sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022, pendaftaran perkara perdata di Pengadilan Negeri Parigi sudah dilaksanakan secara elektronik.



Gambar Tampilan Halaman Dashbord Meja E-Court



Gambar Meja Pelayanan E-Court PN Parigi

a. Pembayaran Panjar Biaya Secara Elektronik (e-payment)

Dalam sistem pembayaran panjar biaya secara elektronik, pengguna terdaftar maupun pengguna lain akan langsung mendapatkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-court. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang ditetapkan dan dikonfigurasikan oleh pengadilan, dan besaran biaya radius yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa.

e-SUKM sendiri merupakan aplikasi elektronik untuk menghitung sendiri panjar biaya perkara bagi para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Parigi. Aplikasi ini merupakan web-based application, suatu aplikasi yang terinstal di server dan diakses menggunakan penjelajah web atau yang dikenal sebagai browser melalui suatu jaringan internet, sehingga para pihak sejak awal sudah mengetahui berapa biaya panjar perkara yang harus dibayar sehingga tercipta efisiensi dan transparansi dalam biaya perkara.



Gambar Tampilan Pembayaran Panjar Biaya Perkara-Perdata (e-Paymen)

b. Pemanggilan Elektronik (e-summons)

Sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 bahwa pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-court Panggilan / pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada:

- Penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik; dan
- Tergugat atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik.

Berdasarkan perintah hakim, jurusita/jurusita pengganti mengirimkan surat panggilan persidangan ke Domisili Elektronik para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan. Dalam hal pihak berdomisili di luar daerah hukum Pengadilan, panggilan/ pemberitahuan kepadanya dapat disampaikan secara elektronik dan ditembuskan kepada Pengadilan di daerah hukum tempat pihak tersebut berdomisili.

Panggilan/pemberitahuan secara elektronik terhadap pihak yang berdomisili di luar wilayah hukum Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.



Gambar Tampilan Sidang - (e-Summons)

c. Persidangan Secara Elektronik (e-litigation)

Persidangan secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/ permohonan / keberatan / bantahan/ perlawanan / intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan / penetapan serta upaya hukum.



Gambar Persidangan online e-litigation

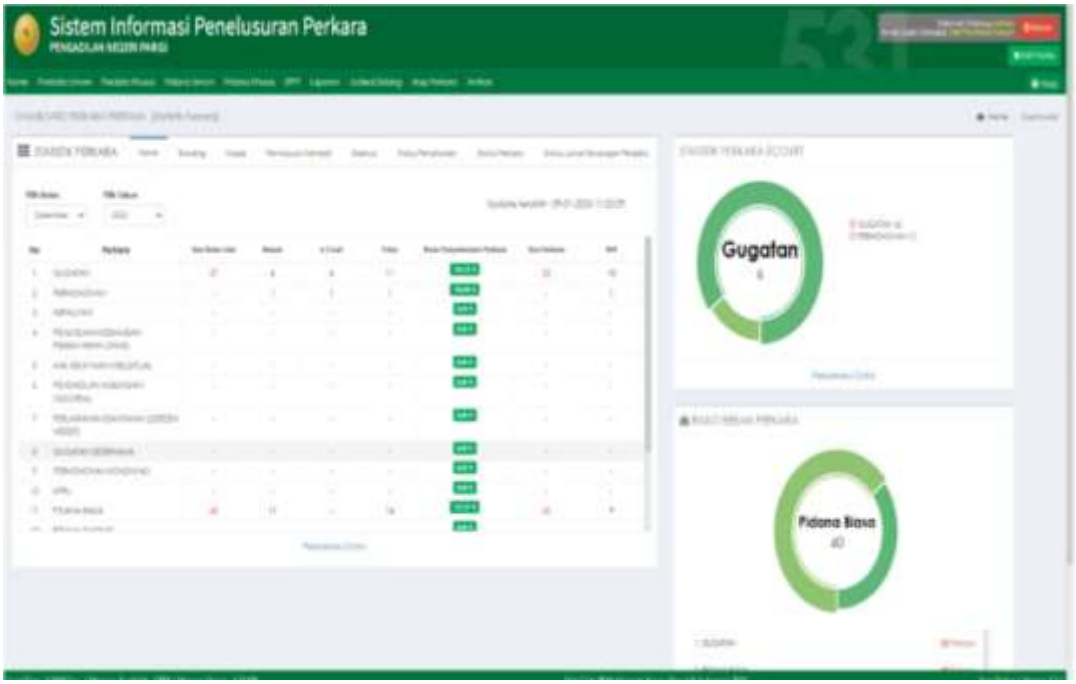
2. Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi, maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi mengenai perkara baik untuk pihak internal pengadilan maupun pihak eksternal. SIPP di Pengadilan Negeri Parigi merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan tata kelola pengadilan yang berbasiskan elektronik dalam rangka meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien.

SIPP merupakan aplikasi teknologi berbasis web untuk memberikan semua informasi perkara terkait proses penanganan perkara. Misalnya, pendaftaran perkara, biaya perkara, informasi susunan majelis hakim, nomor perkara, jadwal persidangan, tanggal putusan yang

bisa diakses masyarakat kapanpun dan dimanapun dengan mudah, cepat dan murah. Publikasi perkara secara online memiliki arti yang amat penting dalam proses transparansi peradilan. Melalui publikasi perkara ini masyarakat dapat dengan mudah mengakses produk pengadilan di manapun dan kapanpun. Publikasi perkara juga dapat memacu peningkatan kualitas kinerja aparat pengadilan, karena setiap orang dapat menilai kualitas kinerja pengadilan. Aparat pengadilan akan terpacu untuk mempublikasi perkara yang ditanganinya secara berkualitas dan profesional.

Proses Back Up Data SIPP telah dilaksanakan setiap hari Kerja sedangkan untuk Backup Aplikasi telah dilakukan minimal sekali dalam setiap minggunya. Proses Sinkronisasi Data SIPP dengan Server Mahkamah Agung RI dan Server Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah berjalan. Personil Hakim dan Panitera Pengganti dan Pegawai secara umum telah memahami penggunaan Aplikasi Sistem Informas Penelusura Perkara (SIPP) untuk membantu proses percepatan penyelesaian perkara yang ditangani.



Gambar Sistem Informasi Penelusuraun Perkara

3. Aplikasi Online

Berikut ini adalah aplikasi online termasuk aplikasi yang diakses melalui jaringan internet Pengadilan Negeri Parigi (lokal).

No.	Jenis Aplikasi	Penanggungjawab	Keterangan
1.	SIPP	Kepaniteraan	Online dan Lokal
2.	e-Court	Kepaniteraan	Online
3.	e-Berpadu	Kepaniteraan	Online
4.	Direktori Putusan	Kepaniteraan	Online dan Lokal
5.	MIS	Kepaniteraan	Online dan Lokal
6.	Morkis	Kepaniteraan	Online dan Lokal
7.	SISUPER	Kepaniteraan	Online
8.	SIKEP	Kepegawaian	Online
9.	SAKTI Bagian Penganggaran	Perencanaan	Online
10.	e-iplans	Perencanaan	Online
11.	e-Monev (PP-39)	Perencanaan	Online
12.	SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan)	Perencanaan	Online
13.	E-Mentor	Perencanaan	Lokal
14.	SIRUP	Kesekretariatan	Online
15.	Komdanas	Kesekretariatan	Online
16.	SatuDJA	Kesekretariatan	Online
17.	SIMARI PNBP	Keuangan	Online
18.	SAKTI Bendahara Penerima	Keuangan	Online
19.	SAKTI PPSPM	Keuangan	Online
20.	SAKTI GLP	Keuangan	Online
21.	SAKTI Aset	Umum	Online
22.	SAKTI Persediaan	Umum	Online
23.	e-BIMA	Umum	Online
24.	e-Sadewa	Keuangan	Online
25.	PTSP+ (Aplikasi Persuratan)	Umum dan Keuangan	Online
26.	My SAPK	Kepegawian	Online
27.	e-Kinerja	Kepegawian	Online
28.	Absen Honor	Kepegawian	Online Lokal
29.	SIASN	Kepegawian	Online
30.	Absen Online ASN	Kepegawian	Online

4. Website

Pengadilan Negeri Parigi memiliki website yang dapat diakses melalui https://www.pn-parigi.go.id/ma/



Gambar Website Pengadilan Negeri Parigi

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023



BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

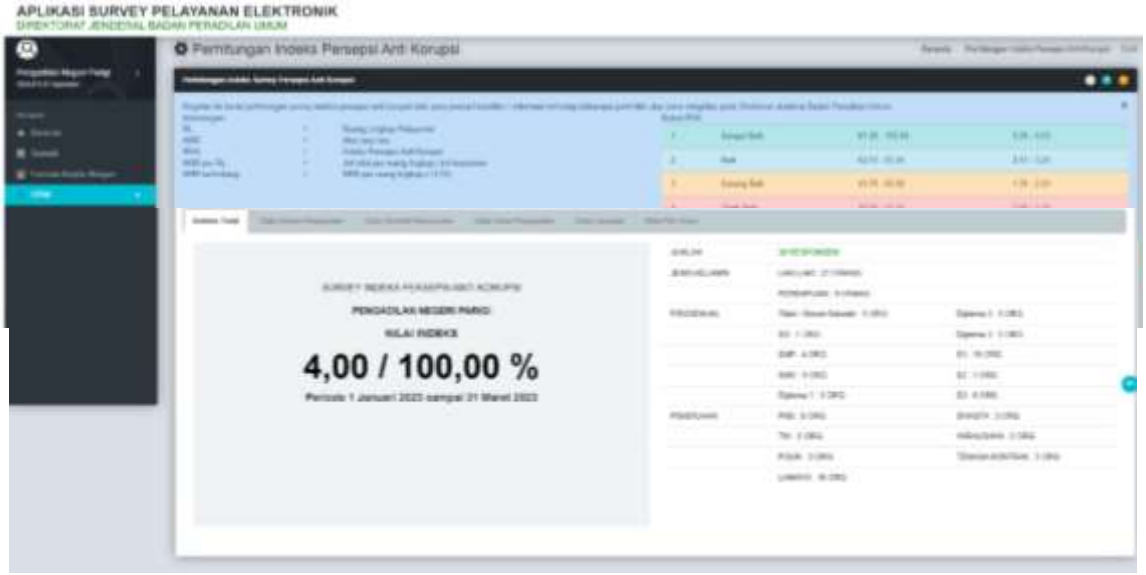
PENGADILAN NEGERI PARIGI

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Tugas Pengadilan Negeri Parigi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar pelayanan Peradilan, dimana segenap pelaksanaan dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik harus berperilaku:

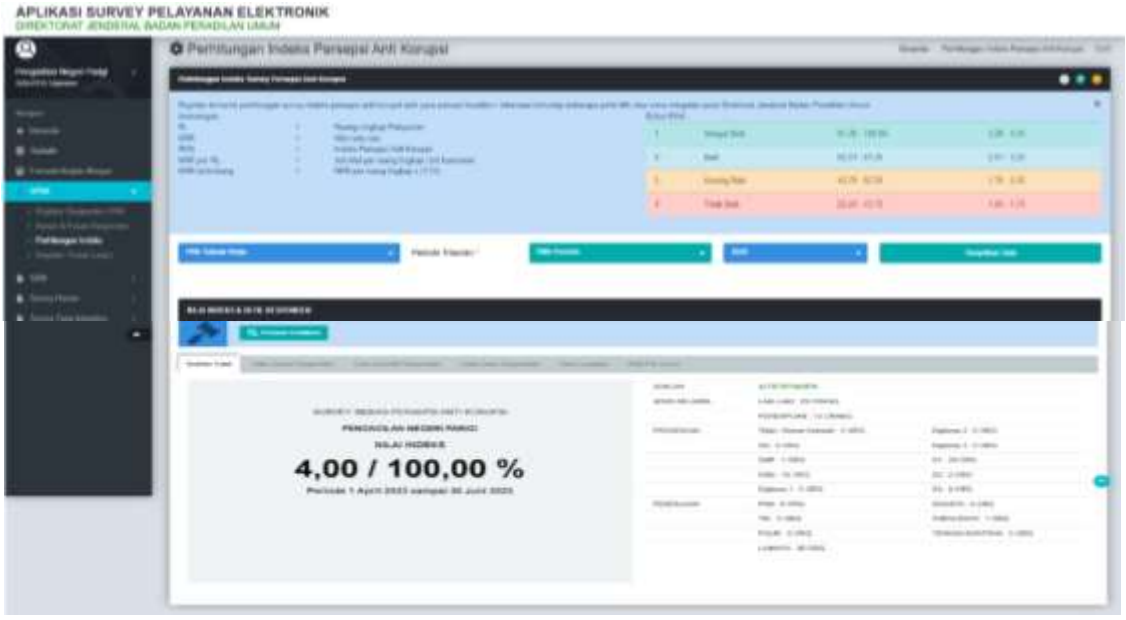
1. Adil dan tidak diskriminast
2. Cermat
3. Santun dan ramah:
4. Tegas, Handal, dan tidak memberikan keputusan yang berlarut-larut
5. Profesionat
6. Tidak mempersulit
7. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar
8. Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Akuntabilitas Dan Integritas Institusi Pengadilan Negeri Parigi:
9. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan Peraturan Peradilan dan Perundang-Undang yang berlaku:
10. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan:
11. Tidak menyalagunakan sarana dan prasarana serta serta fasilitas pelayanan Publik:
12. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan Masyarakat
13. Tidak menyalagunakan informasi, jabatan, dan /atau kemenangan yang dimiliki:
14. Sesuai dengan kepantasan, Dan
15. Tidak menyimpang dari Prosedur.

Berdasarkan kuesioner yang terkumpul dan terisi dalam Triwulan I 2023 Sejumlah 30 Responden. Berdasarkan survey kepuasan Masyarakat dipengadilan Negeri Parigi dan Hasil Analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa indeks Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Parigi sebesar **100%** yang berada pada kategori **Sangat Baik** (pada interval 4,00 s/d 100.00).



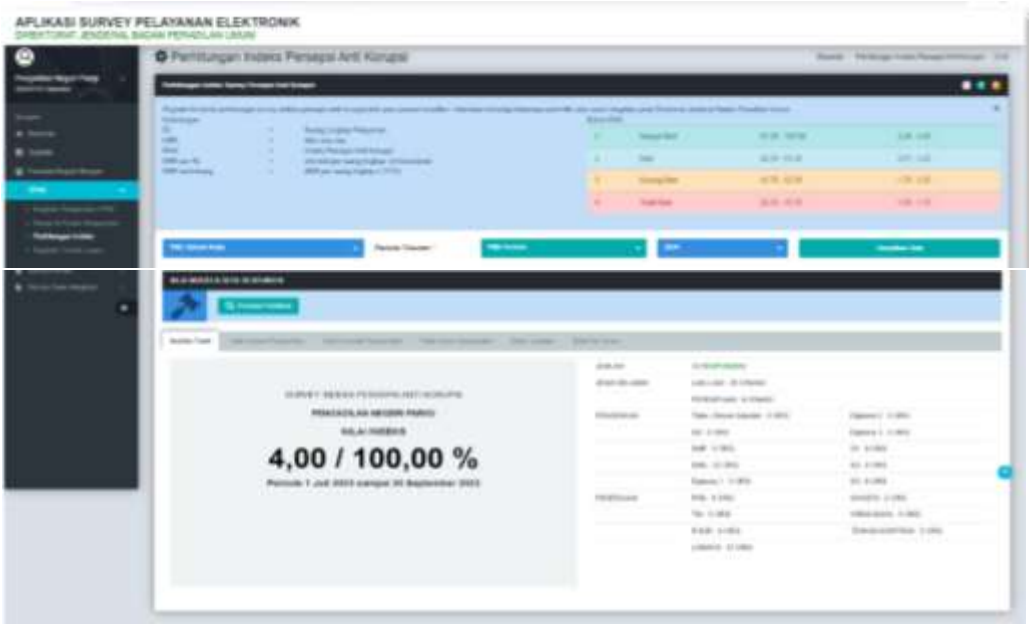
Gambar Hasil Kepusan Masyarakat Terhadap Pelayanan Triwulan I

Triwulan II 2023 Sejumlah 43 Responden. Berdasarkan Survey kepuasan Masyarkat di Pengadilan Negeri Parigi dan hasil Analisis data yang telah dilakukan diketahuai bahwa indeks Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Parigi sebesar **100%** yang berada pada kategori **Sangat Baik** (pada interval 4 s/d 100,00).



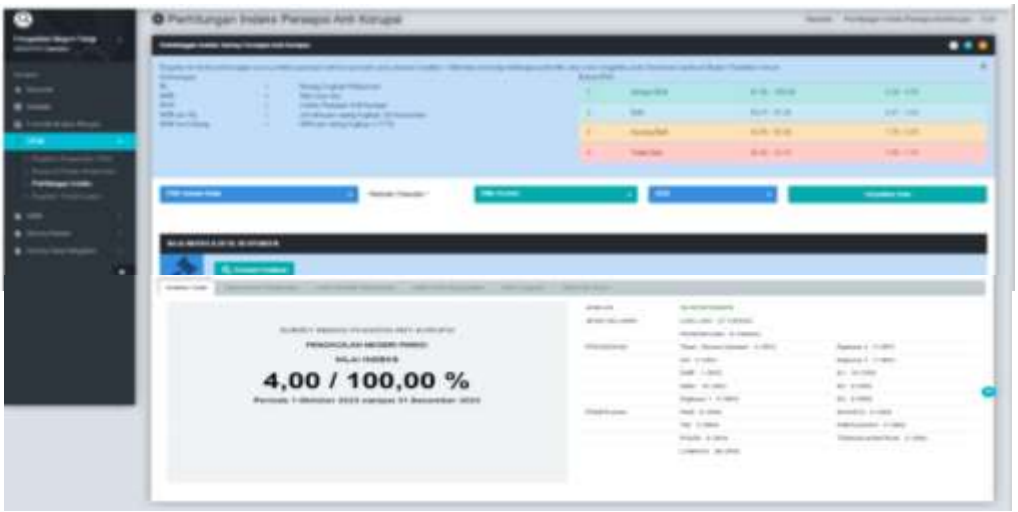
Gambar Hasil Kepusan Masyarakat Terhadap Pelayanan Triwulan II

Triwulan III 2023 Sejumlah 33 Responden. Berdasarkan Survey kepuasan Masyarkat di Pengadilan Negeri Parigi dan hasil Analisis data yang telah dilakukan diketahuai bahwa indeks Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Parigi sebesar **100%** yang berada pada kategori **Sangat Baik** (pada interval 4 s/d 100,00).



Gambar Hasil Kepusan Masyarakat Terhadap Pelayanan Triwulan III

Triwulan IV 2023 Sejumlah 36 Responden. Berdasarkan Survey kepuasan Masyarkat di Pengadilan Negeri Parigi dan hasil Analisis data yang telah dilakukan diketahuai bahwa indeks Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Parigi sebesar **100%** yang berada pada kategori **Sangat Baik** (pada interval 4 s/d 100,00).



Gambar Hasil Kepusan Masyarakat Terhadap Pelayanan Triwulan IV

A. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2009 terus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan-perubahan yang mendasar dalam mencapai sasaran Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Agar masyarakat merasakan hasil percepatan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan pemerintah. Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai *role model* Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan. Pembangunan Zona Intergritas mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Negeri Parigi berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan yang kami berikan. Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Instansi Pemerintah telah menjelaskan bahwa proses pembangunan Zona Integritas memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu pencanangan, pembangunan, pengusulan, penilaian, dan penetapan. Sebagai langkah awal dicanangkannya suatu unit kerja dalam pembangunan ZI

menuju WBK/WBBM adalah dengan pembuatan dan penandatanganan Pakta Integritas yang disaksikan oleh pihak pemangku kepentingan dan atau masyarakat, penanda tanganan ini merupakan tonggak awal dan merupakan indikator utama dalam penilaian.

Penandatanganan Pakta Integritas sebagai wujud awal dalam pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Parigi telah dilaksanakan pada tanggal 11 Jani 2017 yang selanjutnya pada tahun berjalan dilakukan penyusunan rencana program bersama dan berkomitmen untuk membangun Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi pada tahun 2023. Pada tahun 2023 ini pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Parigi yang sudah barang tentu banyak perubahan dalam mencapai sasaran Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk melahirkan inovasi-inovasi layanan yang semakin memberikan kemudahan dan kecepatan layanan yang diberikan.



Gambar Penandatangan Pakta Integritas Pengadilan Negeri Parigi

Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri parigi dimulai tahun 2017 yang setiap tahunnya berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Untuk mendukung terwujudnya Zona Integritas ada area-area perubahan yang sudah dilakukan antara lain :

1. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (*mind set*), serta budaya kerja *(culture set*) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan ZonaIntegritas.

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan manajemen perubahan, yaitu:

a. Penyusunan Tim Kerja
b. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

2. Penataan Tata Laksana

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM (PERMENPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019). Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah:

a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

3. Penataan Manajemen SDM

Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

4. Penguatan Akuntabilitas

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan
b. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.

5. Penguatan Pengawasan dan Area

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah (Peraturan MENPAN-RB No. 10 /2019). Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah;
b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;

6. Peningkatan Kualitas Pelayan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah:

a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;
b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah; dan
c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan
d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.

Membangun dan mengimplementasikan program reformasi birokasi secara baik sehingga mampu menumbuh-kembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja, dan budaya birokrasi yang melayani publik secara baik di lingkungan K/L/Pemda. Membangun dan mengimplementasikan program reformasi birokasi secara baik sehingga mampu menumbuh-kembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja, dan budaya birokrasi yang melayani**.**

"Agar masyarakat dapat menikmati beragam pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, murah, dan inklusif".

Walaupun Kita Beda, Tetapi Zona Kita Tetap Sama, Yaitu **"ZONA INTEGRITAS"** publik.



Gambar 7 Media Pengaduan ZONA Integritas



Gambar Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas.



Gambar Menolak Garfitasi Zona Integritas.



Gambar Menolak Garfitasi Zona Integritas.

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau, maka Pengadilan Negeri Parigi telah melaksanakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu pelayanan. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pengadilan Negeri Parigi terdiri dari Pelayanan di Kepaniteraan Perdata, Pidana dan Hukum serta Pelayanan Kesekretariatan yaitu proses Distribusi Surat Masuk /Keluar di Bagian Umum dan pelayanan e-court serta layanan meja inzage dan Layanan Disabilitas.



Meja Layanan PTSP Pengadilan Negeri Parigi Kelas II

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik yang baik dan berkualitas merupakan hak warga negara sekaligus kewajiban konstitusional negara. Oleh karenanya pemerintah wajib hukumnya menyelenggarakan pelayanan publik yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Sebagian masyarakat seringkali mendapat pengabaian pelayanan publik yang baik dari Penyelenggara Pelayanan Publik. Bahkan kecenderungan penyelenggaraan pelayanan publik melakukan pelayanan publik seadanya, pelayanan publik dianggap hanya sekadar menggugurkan kewajiban dan bagian dari tugas rutin semata. Dalam hubungan hukum, masyarakat dengan penyelenggara pelayanan publik tidak punya kedudukan yang seimbang serta tidak memperoleh akses mendapatkan informasi pelayanan publik yang baik.

Di dalam proses pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dan sebagai respon atas hal tersebut maka Pengadilan Negeri Tilamuta telah melakukan upaya – upaya perbaikan di segala unit. Pengadilan Negeri Parigi terus giat melakukan pembenahan perbaikan sistem kerja yang nantinya akan berdampak pada peningkatan efisiensi, efektifitas, serta produktifitas SDM Aparatur yang transparan dan akuntabel, serta memiliki Standar Pelayanan yang sesuai dengan kaidah manajemen modern yang dipraktekkan secara konsisten, hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan prima. Inovasi yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Tilamuta dan telah berjalan dari Tahun 2023 di antaranya adalah :

1. Aplikasi Antrian PTSP

Adalah aplikasi bagi pengguna layanan sidang dan PTSP berupa nomor antrian secara elektronik, aplikasi yang terdapat dalam mesin antrian memudahkan manajemen antrian pada layanan masyarakat agar mempermudah pengguna layanan merasa nyaman dan mudah dalam memperoleh haknya untuk dilayani, serta memberikan kemudahan pada petugas pelayanan dalam melayani pelanggan sehingga tercipta kelancaran dalam pelayanan.



Gambar Anjungan dan monitor Antrian di Ruang PTSP PN Parigi

2. SIM Potover

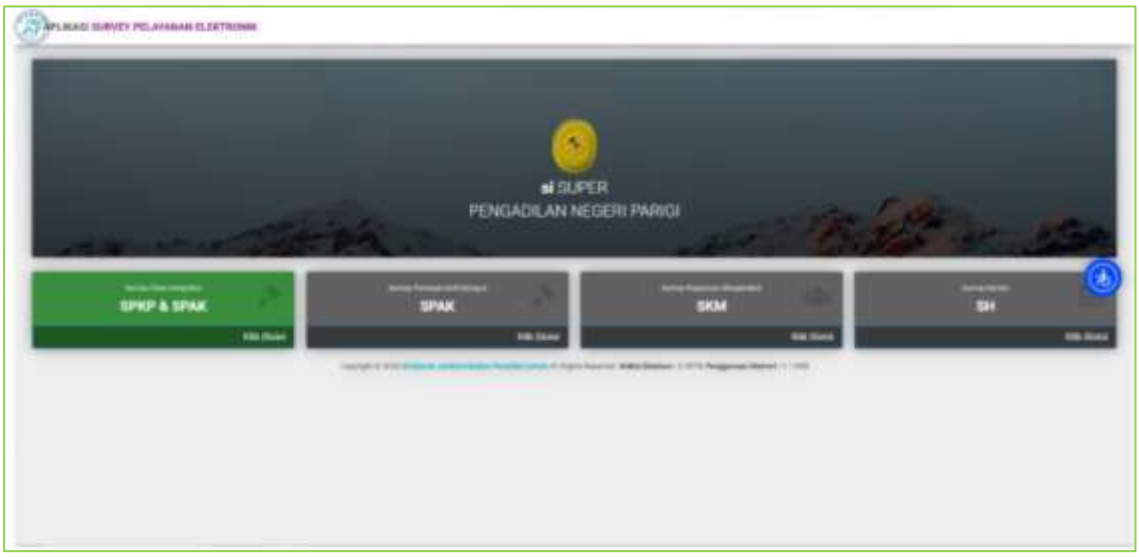
Merupakan Sistem Informasi Pelayanan Terpadu via Elektronik. Bagi Masyarakat yang ingin mendapatkan Informasi Berperkara, Pengaduan, Prodeo dan Sidang Keliling, Produk Pengadilan, Biaya Beperkara, Layanan Prosedur Berpekara dan Layanan Pengadilan lainnya di Pengadlan Negeri Parigi. Dapat ditanyakan secara langsung melalui nomor whatsapp 0812-9448-8449, kemudian pertanyaan yang masuk ke nomor whatsapp tersebut akan dijawab oleh petugas informasi.



Gambar SIM Potove Layanan Informasi Beperkara Bagi Pengguna Layanan

3. Aplikasi Survey SISUPER

Adalah aplikasi yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan PTSP, mengukur Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat secara elektronik.



Gambar Tampilan SISUPER PN Parigi

4. Digital Corner Information

Information (Sudut Informasi Digital) adalah sarana informasi digital yang diletakkan di sudut ruang ramah pengunjung yang berisi informasi tentang jadwal sidang, antrian sidang, video sosialisasi, Sarana Komputer yang terkoneksi dengan internet, perpustakaan mini, pengumuman, running text dan pengisian daya gratis.



Gambar Digital Corner Informatio PN Parigi

5. Reward

Bagi Pengguna Layanan adalah bentuk penghargaan yang diberikan kepada pengguna layanan yang tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar yang ditentukan baik waktu maupun kualitas dari petugas layanan. Sehingga bentuk kompensasinya adalah dalam bentuk kartu bebas antrian atau suvenir/merchandise lainnya yang disediakan di lemari display yang terpajang di ruang PTSP.



Gambar Lemari Display souvenir kompensasi Bagi Pengguna Layanan

6. Akreditasi Penjamin Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Tim Akreditasi Penjamin Mutu Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Tim Akreditasi Internal dengan Surat Keputusan Nomor : 1639/DJU/SK/OT.01/9/2015 untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia sesuai standar sertifikat ISO 9001:2008, diperkaya dengan penerapan International Frame Work For Cour Excellent, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB), Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pembangunan Zona Integritas dan Standar Penilaian yang pernah dilakukan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Uum pada Tahun 2014 maka Pengadila Negeri Parigi Telah Memperoleh Sertifikat menajeman mutu bagi pengadilan adalah salah suatu penilaian yang menjadi tolak ukur

kinerja sebuah pengadilan dengan nomor : TAPM.021/QMR/Sertifikat/4/2022 dari Diketorat Jenderal Badan Peradialn Umum Mahkamah Agung RI.



Gambar Akreditasi Pengadilan Negeri Parigi



Gambar Sarana Ruang Tamu Terbuka



Gambar Sarana Ruang Laktasi PN Parigi



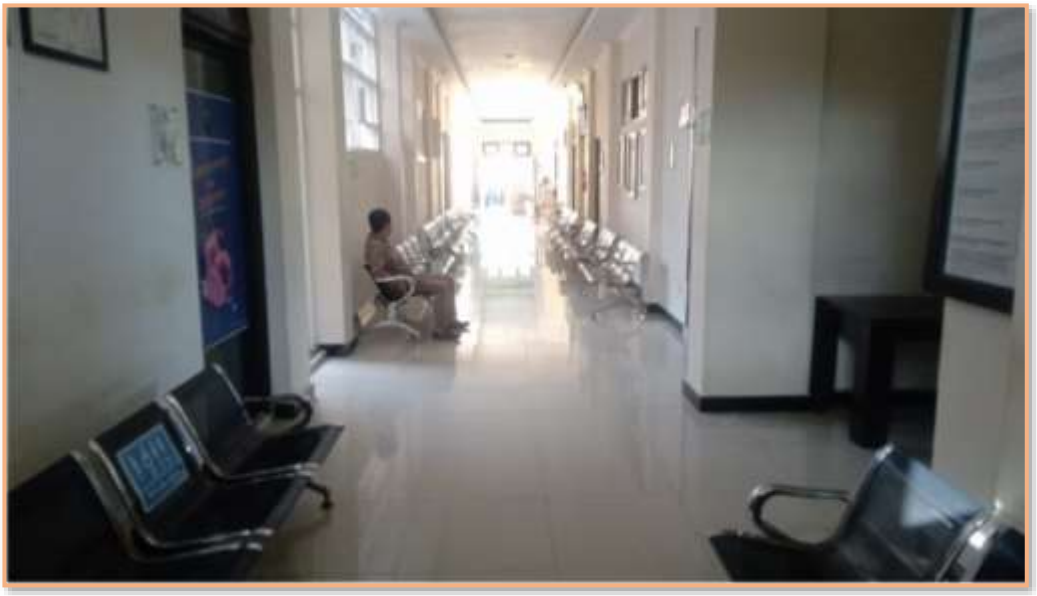
Gambar Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Parigi



Gambar Ruang Sidang Dua Pengadilan Negeri Parigi



Gambar Ruang Sidang Anak Pengadilan Negeri Parigi



Gambar Ruang Tunggu Pengunjung Sidang PN Parigi



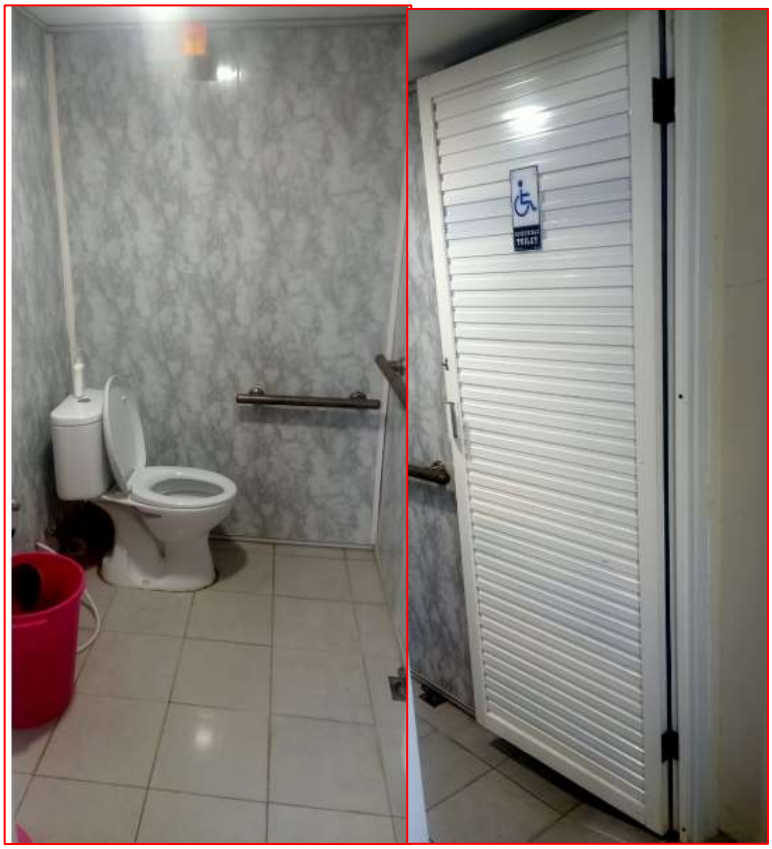
Gambar Maklumat Pelayanan PN Parigi



Gambar Ruang Tunggu Difabel Pn Parigi



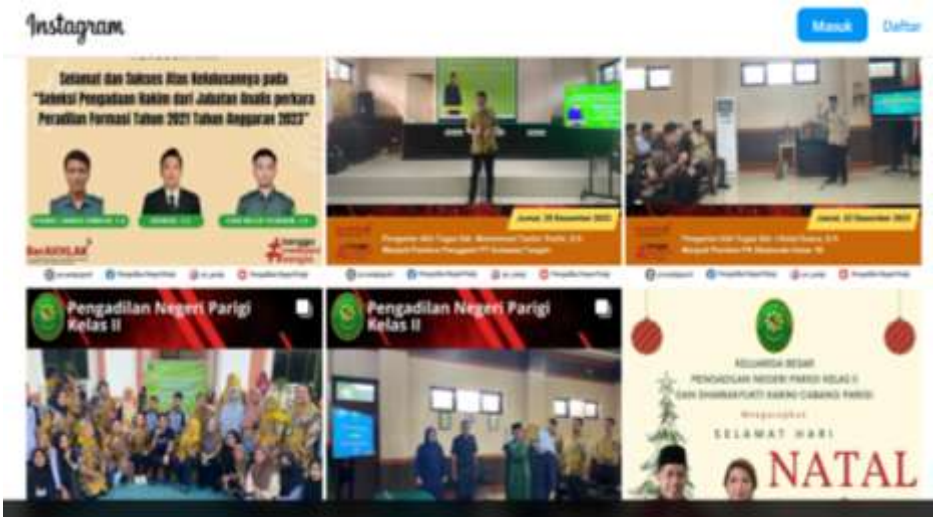
Gambar Layanan Prioritas PN Parigi



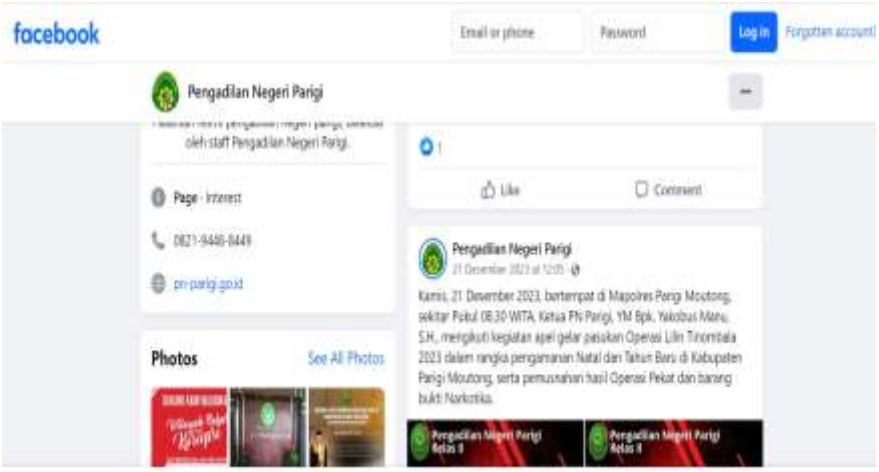
Gambar Toilet Khusus Difabel



Gambar Ruang Istirahat Pengunjung dan Ruang Merokok



https://www.instagram.com/pn_parigi/?hl=id



https://www.facebook.com/pnparigii/

Gambar Media Sosial Instagram dan Facebook

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023



BAB VI
PENGAWASAN

PENGADILAN NEGERI PARIGI

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan Peradilan sendiri yang mencukupi 2 (Dua) jenis pengawasan yaitu pengawasan melekat dan pengawasan Fungsional, pengawasan melekat adalah serangkain kegiatan yang bersifat sebagai pengadilan yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahanya secara Preventif dan Represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efiensi sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan Perundang-Undang yang berlaku. Sedangkan pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjukan untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperlukan untuk itu.

Pengawasan Secara Internal pada Pengadilan Negeri Parigi secara umum dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi yang dibantu oleh Wakil Ketua, meliputi:

1. Semua tingkah laku para hakim, panitera/sekretaris para pejabat struktual dan fungsional, panitera pengganti dan seluruh pegawai.
2. Dalam hal pengawasan tersebut ketua Pengadilan Negeri Parigi juga menunjuk hakim pengawas masing-masing bidang sesuai dengan surat keputusan ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor: W21.U7/06/KP.04.6/01/2023 tanggal 04 Januari 2023 tentang perubahan penunjuk koordinator Hakim pengawas dan Hakim-Hakim pengawas bidang Pada Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2023, dengan tujuan agar setiap bidang diharapkan dapat menjalankan tugasnya masing-masing. Dang apabila terjadi diharapkan kendala hakim pengawas akan menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
3. Ketua Pengadilan Negeri Parigi juga melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan tugas sehari-hari baik mengenai Hakim, Panitera, Sekretaris, Para Pejabat Struktual Dan Fungsional apakah telah dapat melaksanakan tugas dengan baik atau ada hambatan-hambatan yang ditemui dilakukan dengan rapat bulanan setiap bulannya.
4. Ketua Pengadilan Negeri Parigi juga mengevaluasi kinerja panitera penganti apakah semua perkara ditangani telah sesuai dengan SOP.

5. Panitera dan sekretaris juga melakukan pengawasan kepada setiap bidang yang dijabat oleh para panitera muda dan kasubag, yang bertanggung jawab atas staf yang bertugas dibidang masing-masing.

   Untuk Pengawasan pada Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2023 telah dilakukan secara Priodik.

No	Nama kegiatan Pengawasan	Subjek Pengawas	Objek Yang Diawasi	Waktu	Tempat
1.	Pengawasan Reguler	PT Parigi	Semua Bidang	15 Maret 2023 s.d 17 Maret 2023	Kantor PN Parigi
2.	Pengawasan Hasil Asesment	PT Parigi	Semua Area	19 September 2023 s.d 20 September 2023	Kantor PN Parigi
3.	Pengawasan Reguler	PT Parigi	Semua Bidang	26 Oktober 2023 s.d 28 Oktober 2023	Kantor PN Parigi

B. EVALUASI

Pada Tahun 2023 dilakukan evaluasi atas hasil pengawasan terhadap bidang-bidang dipengadilan Negeri Parigi dengan kegiatan sebagai berikut.

1. Melaksanakan rapat setiap bulan untuk mengevaluasi pelaksaan kinerja di Pengadilan Negeri Parigi.
2. Melaksanakan rapat tindak lanjut atas temuan dari hakim pengawas Pengadilan Umum Mahkamah Agung .
3. Tahun 2023 evaluasi pelayanan Peradilan juga dilakukan melalui:
   a. Survey kepuasan masyrakat (SKM) secara elektronik untuk melihat repon terhadap pelayanan Publik. Hasil survey keputusan responden terhadap (Sembilan) rungan linkup layanan Peradilan Negeri Parigi dengan induksi kepuasan masyarakat (IKM) sebesar **100%** dengan mutu pelayanan **Sangat Baik.**
   b. Survey indeks presepsi anti korupsi (IPAK) secara elektronik untuk melihat hasil survai masyarakat terhadap Presensi anti Korupsi Dipengadilan Negeri Parigi Pada Tahun 2023, hasil indeks presepsi anti korupsi sebesar **4.00/100%** dengan mutu presepsi **Bersih Dari Korupsi.**



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023



BAB VII

PENUTUP

PENGADILAN NEGERI PARIGI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Selama Tahun 2023 Pengadilan Negeri Parigi tetap berupaya melaksanakan tugas Pokok dan Fungsi dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan.

1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi perkara dan administrasi umum sudah berjalan dengan baik dan sebagaimna mestinya.
2. Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Parigi mengalami peningkatan di bandingankan tahun sebelumnya.
3. Pengadilan Negeri Parigi berupaya untuk semakin meningkat pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi di Pengadilan .
4. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pengadilan Negeri Parigi yang berkaitan dengan pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi sudah dilaksanakan dengan baik.
5. Sudah tersedianya pelayanan terpadu satu di Pengadilan Negeri Parigi yakni pelayanan yang proses pengelolahannya dimulai dari tahap yakni pelayanan yang proses pengelolahanya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya sebuah dokumen dilakukan didalam satu tempat.
6. Sudah diterapkan aplikasih E-Crout (Pendaftaran Perkara Secara Elektronik), sehingga para pihak yang mendaftar perkara dapat melakukan pendaftaran dimana saja tanpa harus datang ke Pengadilan Negeri Parigi.
7. Sudah diterapkan aplikasi E-Crout (Elektronik Berkas Pidana Terpadu)
   Untuk mewujutkan digitalisasi administrasi perkara pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitasi dan efisiensi layanan perkara Pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Pencari Keadilan.

B. REKOMENDASI

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja diPengadilan Negeri Parigi maka diperlukan:

1. Penambahan sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
2. Penambahan lokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan Prasarana, Pembangunan Gedung kantor dan rumah Dinas.

PENGADILAN NEGERI PARIGI KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PARIGI KELAS II

NOMOR : 10.C /KPN-W21-U7/SK/KP3.4.1/1/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN

PENGADILAN NEGERI PARIGI KELAS II TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI PARIGI KELAS II

Menimbang :

a. bahwa untuk kesempurnaan, percepatan dan akurasi data dalam Penyusunan Laporan Tahunan dipandang perlu Penunjukan Tim Penyusun Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Parigi Kelas II Tahun 2024;

b. bahwa selain pertimbangan pada huruf a di atas, dengan dibentuknya Tim Penyusun Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Parigi Kelas II Tahun 2024, diharapkan agar penyelesaian penyusunan laporan dapat diselesaikan tepat waktu;

c. bahwa yang ditunjuk dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya sebagai Tim Penyusun Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Parigi Kelas II Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009, jo Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
2. Umum;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata

Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku 1 tentang pedoman pelaksana tugas dan administrasi pengadilan bidang pola kelembagaan peradilan, administrasi kepegawaian peradilan, administrasi perencanaan, administrasi tata persuratan, tata kearsipan dan administrasi
5 keprotokolan, kehumasan dan keamanan, administrasi perbendaharaan, pedoman bangunan gedung kantor dan rumah jabatan badan peradilan
6. dibawah Mahkamah Agung R.I, Prototype gedung pengadilan dan rumah dinas dan pola klasifikasi surat Mahkamah Agung R.I.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi Atas Hasil Pengawasan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan;

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor MA/SEK/07/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PARIGI KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN PADA PENGADILAN NEGERI PARIGI KELAS II TAHUN 2024.**

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Kelas II Nomor W21-U7/ /OT.01.2/12/2022 tanggal 07 Desember 2022;

KEDUA : Menunjuk yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) dalam lampiran surat keputusan ini, sebagai Tim Penyusun Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2024;

KETIGA : Kepada yang ditunjuk sebagai Tim Penyusun Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Parigi Kelas II Tahun 2024 dalam lampiran surat keputusan ini, agar melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 04 Januari 2024
KETUA

YAKOBUS MANU, S.H

Tembusan :
1. YM. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PARIGI KELAS II

NOMOR : /KPN.W21-U7/SK/KP3.4..1/1/2024

TANGGAL : 04 Januari 2024

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN
PENGADILAN NEGERI PARIGI KELAS II TAHUN 2024

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	YAKOBUS MANU, SH.	KETUA	PEMBINA
2	RAHMAWATI, SH	PANITERA	KOORDINATOR KEPANITERAAN
3	INDORENUNG ST. SH.	SEKRETARIS	KOORDINATOR KESEKRETARIATAN
4	TALHA S.Kom	KASUBBAG PTIP	PENANGGUNG JAWAB PENYUSUN DOKUMEN
5	ABDUL KADIR M.DJEN ABBAS, SH	PANMUD PIDANA	PENYAJI DATA PIDANA
6	NI MD SUDIARJANI, SH	Plt. PANMUD HUKUM	PENYAJI DATA HUKUM
7	SYAHRUDDIN, SH	PANMUD PERDATA	PENYAJI DATA PERDATA
8	RIYA WAHYUNINGTYAS, SH	KASUBBAG KOTL	PENYAJI DATA KEPEGAWAIAN DAN ORTALA
9	MUHAMMAD MU'AMAR, S.Psi	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	PENYAJI DATA UMUM DAN KEUANGAN

10	BHELI ISYA KURNIAWAN KOLAY, ST	STAF PTIP / PRAKOM	OPERATOR

Ditetapkan di Parigi
Tanggal 04 Januari 2024
KETUA

YAKOBUS MANU, SH.